

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN KARANG
ANYAR KECAMATAN NEGLASARI
KOTA TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

HIJRIATUL MABRUK

NIM. 6661091655

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, AGUSTUS 2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hijriatul Mabruk
NIM : 6661091655
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 18 Juni 1991
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang" ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, Agustus 2016



Hijriatul Mabruk

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : HJRIATUL MABRUK

NIM : 6661091655

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG".

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 22
Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS

Serang, Agustus 2016

Ketua Penguji:

Leo Agustino, Ph.D
NIP. 197408032003121001

(Leo Agustino)

Anggota:

Titi Stiawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197407052006042011

(Titi Stiawati)

Anggota:

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

(Listyaningsih)

Mengetahui,


Dekan FISIP Untirta
DR. Agus Sjafri, M.Si
NIP. 197108242005011002


Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : HIJRIATUL MABRUK
Nim : 6661091655
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKI) DI KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMTAN NEGLASARI KOTA TANGERANG

Serang, Agustus 2016
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 1976 03292003 122001

Pembimbing II

Ipah Emmy Jumiati S.IP, M.Si
NIP. 1975 01312005 012004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DR. Agus Sufari, S.Sos, M.Si
NIP. 1971 08242005 011002

*Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada
keringanan. Karena itu bila kau sudah
selesai (mengerjakan yang lain). Dan
berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al
Insyirah : 6-8)*

*“Lebih baik terlambat dan gagal daripada tidak
pernah melakukannya sama sekali”*

***-Ku persembahkan, mini karya ku
kepada Alm Ayahanda, Ibunda dan
Kakanda tersayang sebagai wujud
kasih sayang dan hormat ku.-***

ABSTRAK

Hijriatul Mabruk, 6661091655. Skripsi. Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2016. Dosen Pembimbing I: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si.

Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN)

Latar belakang masalah penelitian adalah fenomena kebijakan penyediaan dan penyaluran beras rumah tangga miskin (RASKIN). Program Raskin merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin khususnya di Kota Tangerang. Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa fenomena pelaksanaan program Raskin untuk tahun anggaran 2014 di Kecamatan Neglasari, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala-kendala dari masyarakat bahkan dari aparaturnya sendiri. Kelancaran penyaluran raskin sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 263 responden, dengan menggunakan Rumus Slovin. Metode penelitian untuk mengoprasionalisasikan variabel penelitian yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mencapai angka 75,31% dari yang diharapkan dari hipotesis sebelumnya peneliti berasumsi paling tinggi 70%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja para pembuat dan pelaksana kebijakan program beras rumah tangga miskin bekerja maksimal karena mengingat untuk mensejahterakan waga miskin itu sangatlah susah, yang mana memang mayoritas penduduk secara umum berada di bawah garis kemiskinan.

ABSTRACT

Hijriatul Mabruk. 6661091655. *Research Paper. Implementation of Rice for Poor Household program (RASKIN) in Karang Anyar Village Sub-District Neglasari Tangerang City. Departement of Public Adminstration, Faculty of Social and Political Science, Sultan Ageng Tirtayasa University. 2016. The 1st advisor: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. 2nd advisor : Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si.*

Keywords: Implementation, Rice for Poor Household Program (RASKIN)

Background research problem is the phenomenon of policy provision and distribution of rice for poor households (RASKIN). Raskin is an effort to improve the social prosperity of the Government to improve the prosperity of the poor, especially in Tangerang City. However, the results of observations made that the phenomenon of the implementation of the Raskin program for fiscal year 2014 in Sub-District Neglasari, in implementation is still encountered many obstacles from the public and even from the apparatus itself. The continuity of distribution of Raskin is very depending on the discipline of all actors involved. This study aims to determine how the Rice for Poor Households program in Karang Anyar Village Sub-District Neglasari Tangerang City, in addressing issues of poverty alleviation and social prosperity. The study was conducted by taking a sample of 263 respondents, using a Slovin formula. Operationalize research methods to study variables that descriptive quantitative approach. From the discussion we concluded that Rice for Poor Household program (RASKIN) in Karang Anyar Village Sub-District Neglasari Tangerang City reached 75.31% than expected from the previous hypothesis is researcher assumed the highest is 70%. This proves that the performance of policy makers and implementers rice program a maximum working poor households because given to the prosperity for the poor citizens, it extremely difficult, which is the majority of the general population were below the poverty line.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang”.

Dengan selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung penulis. Terlebih kepada kedua orang tua yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta do’a kepada penulis yang tidak henti-hentinya. Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.I.Kom, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga sebagai Pembimbing I yang membantu serta memberikan arahan, saran yang berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi.
7. Riswanda, Ph.D, Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si, Pembimbing II yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan teliti dan sabar dari awal hingga akhir.
9. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si, Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
10. Dinas Sosial Kota Tangerang serta Kelurahan Karang Anyar Kota Tangerang yang telah membantu penulis dalam memberikan data penelitian ini.
11. Mohamad Idrus, Pipit Fitriyah, Syahrul Amin, Awaludin Fadjri, Nur Hikmat kakak-kakak yang telah memberikan bantuan materi dan semangat dalam pembuatan skripsi.
12. Monika Aprilianingsih, Astri Dwi Astuti, Septian Gestiardi yang tidak pernah berhenti memberi dukungan, selalu membantu segala hal, dan selalu ada di saat penulis sedang dalam keadaan susah dan bahagia.
13. M. Dace Ali Yusri, Musyarofah, Puspita Sugiharti, Yulia Wahyuningtyas, Auditerry Velashy, Resty Virda S, Ria Purnama, Eldha Furqon A. dan senior Ilmu Administrasi Negara yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu, karena ilmu yang kalian berikan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah penulis lupakan.

14. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTIRTA 2009 Reguler dan Non Reguler terima kasih untuk setiap kebaikan yang kalian berikan selama ini dan diskusi-diskusi yang bermanfaat tentunya.
15. Teman-teman Kepengurusan HMI Komisariat PERSIP UNTIRTA Tahun 2012, DPM FISIP UNTIRTA Tahun 2012, HIMANE FISIP UNTIRTA 2010 - 2011 yang telah berbagi pengalaman didalam berorganisasi.
16. Ahmad Firdaus Mandala, Richard Virgiawan, Gamal Hariansyah, Mohammad Maulana Ibrahim, Senoaji Purwanto, Diah Adni Fauziah, Ratih Rukmana, Dwi Kurniawati, Feni Auliawati, Mukhlisa Hussaina, Erfani Setyawardani, sahabat SMA yang sampai saat ini masih memberikan dukungan kepada penulis.
17. Yulia, Juli Iskandar, Rizky Ilhamsyah, Guntur Pratama Madya, Misbahudin, Siti Maesfufah, Juhaenah Mutaqien, Sandy Arinata partner kerja yang selalu mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya, sehingga penulis dengan rendah hati menerima masukan dari semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Serang, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
2.1. Deskripsi Teori	14
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	14
2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	17
2.1.3. Tujuan Kebijakan	17
2.1.4. Implementasi Kebijakan	19

2.1.5.	Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	21
2.1.6.	Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan	23
2.1.7.	Unsur-unsur Implementasi	23
2.1.8.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	25
2.1.9.	Konsep Keluarga Miskin dan Kemiskinan	33
2.1.10.	Pelaksanaan Distribusi Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan/Pemerintahan Setingkat	37
2.2.	Penelitian Terdahulu	39
2.3.	Kerangka Berpikir	41
2.4.	Hipotesis Penelitian	44
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1.	Pendekatan dan Metode Penelitian	46
3.2.	Fokus Penelitian	47
3.3.	Lokasi Penelitian	47
3.4.	Fenomena Yang Diamati	47
3.4.1.	Definisi Konsep	47
3.4.2.	Definisi Operasional	48
3.5.	Instrumen Penelitian	49
3.6.	Populasi dan Teknik Sampling	52
3.7.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54

3.7.1.	Teknik Pengolahan Data	54
3.7.2.	Analisa Data	55
3.8.	Jadwal Penelitian	59
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1.	Deskripsi objek Penelitian	60
4.1.1.	Deskripsi Wilayah Kota Tangerang	60
4.1.2.	Profil Kecamatan Neglasari	63
4.1.3.	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Tangerang.....	66
4.2.	Deskripsi Data	69
4.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
4.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	70
4.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .	70
4.2.4.	Hasil Penelitian	71
4.3.	Pengujian Persyaratan Statistik	123
4.3.1.	Uji Validitas Instrumen	123
4.3.2.	Uji Reliabilitas Instrumen	126
4.3.3.	Uji Frekuensi dan Normalitas Data	127
4.4.	Pengujian Hipotesis	129
4.5.	Interpretasi Hasil Penelitian	132
4.6.	Pembahasan	133

BAB V PENUTUP

5.1. Deskripsi objek Penelitian	138
5.2. Saran-saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Alokasi Pagu Raskin Kecamatan Neglasari Kota Tangerang ..	6
Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	49
Tabel 3.2. Skoring Jawaban Terhadap Item Instrumen Pernyataan	52
Tabel 3.3. Perhitungan Sampel Yang Mewakili Dalam Penelitian	53
Tabel 3.4. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian	59
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kecamatan Neglasari	64
Tabel 4.2. Kelurahan di Kecamatan Neglasari	65
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	70
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	70
Tabel 4.6. Tangapan responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan dengan baik	72
Tabel 4.7. Tangapan responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan	74
Tabel 4.8. Tangapan responden terhadap pernyataan bahwa pencapaian hasil dari program raskin berjalan maksimal	75
Tabel 4.9. Tangapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui tentang kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah	76

Tabel 4.10.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah	78
Tabel 4.11.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima	79
Tabel 4.12.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran	80
Tabel 4.13.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah anda	82
Tabel 4.14.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin masih tidak dipungut biaya/harga yang tidak sesuai dalam proses pelayanannya	84
Tabel 4.15.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin yang disalurkan di daerah anda sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin	85
Tabel 4.16.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah memberikan jangka waktu terhadap berlakunya program Raskin	87

Tabel 4.17.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa proses penyaluran distribusi beras Raskin dinilai tepat waktu	88
Tabel 4.18.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam memberikan pelayanan, pihak/tim pelaksana Raskin sudah bekerja sangat cepat	90
Tabel 4.19.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa proses pendistribusi Raskin sudah sesuai dan teratur	91
Tabel 4.20.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa prosedur program Raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah	93
Tabel 4.21.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa adanya dukungan dari Pemerintah daerah mengenai program Raskin	94
Tabel 4.22.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa volume beras yang didistribusikan pemerintah memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM	95
Tabel 4.23.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraan program Raskin	97
Tabel 4.24.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil	99

Tabel 4.25.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam Program Raskin	100
Tabel 4.26.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam program Raskin ini masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab	102
Tabel 4.27.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini	103
Tabel 4.28.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa para tim pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima jatah Raskin	104
Tabel 4.29.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa selain itu para tim dan pelaksana lainnya memberikan pelayanan dengan ramah	106
Tabel 4.30.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin	107
Tabel 4.31.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin	108

Tabel 4.32.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin dapat mengurangi masalah ekonomi	110
Tabel 4.33.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah	112
Tabel 4.34.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program mampu mempertahankan daya beli masyarakat.....	113
Tabel 4.35.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan	115
Tabel 4.36.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa merasa terbantu dan meringankan beban hidup dengan adanya program Raskin	116
Tabel 4.37.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin	117
Tabel 4.38.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa sosialisasi program Raskin sudah berjalan dengan baik	119
Tabel 4.39.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah	120
Tabel 4.40.	Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pendistribusian Raskin telah merata hanya kepada masyarakat miskin	121

Tabel 4.41.	Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pernyataan)	123
Tabel 4.42.	Hasil Uji Reliabilitas Alpha Cronbach	126
Tabel 4.43.	Standar Deviasi Implementasi Program Raskin	127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 4.1. Peta Kota Tangerang	63
Gambar 4.2. Peta Kecamatan Neglasari	65
Gambar 4.3. Diagram Tentang kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan dengan baik .	73
Gambar 4.4. Diagram tentang kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan	74
Gambar 4.5. Diagram tentang pencapaian hasil dari program raskin berjalan maksimal	76
Gambar 4.6. Diagram tentang masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah	77
Gambar 4.7. Diagram tentang masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah	78
Gambar 4.8. Diagram tentang masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima	80
Gambar 4.9. Diagram tentang proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran	81
Gambar 4.10. Diagram tentang pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah anda	83

Gambar 4.11.	Diagram tentang pernyataan bahwa RTS penerima manfaat Raskin tidak dipungut biaya/harga dalam proses pelayanannya	84
Gambar 4.12.	Diagram tentang program Raskin yang disalurkan di daerah anda sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin	86
Gambar 4.13.	Diagram tentang pemerintah memberikan jangka waktu terhadap berlakunya program Raskin	87
Gambar 4.14.	Diagram tentang proses penyaluran distribusi Raskin dinilai tepat waktu	89
Gambar 4.15.	Diagram tentang dalam memberikan pelayanan, pihak/tim pelaksana Raskin sudah bekerja sangat cepat	90
Gambar 4.16.	Diagram tentang proses pendistribusi Raskin sudah sesuai dan teratur	92
Gambar 4.17.	Diagram tentang prosedur program Raskin yang diberikan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah	93
Gambar 4.18.	Diagram tentang adanya dukungan dari Pemerintah daerah mengenai program Raskin	95
Gambar 4.19.	Diagram tentang volume beras yang didistribusikan memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM	96
Gambar 4.20.	Diagram tentang pemerintah memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraan program Raskin	98

Gambar 4.21.	Diagram tentang dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil	99
Gambar 4.22.	Diagram tentang dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil	101
Gambar 4.23.	Diagram tentang dalam program Raskin ini masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab	102
Gambar 4.24.	Diagram tentang petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini	104
Gambar 4.25.	Diagram tentang para tim pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima jatah Raskin	105
Gambar 4.26.	Diagram tentang selain itu para tim dan pelaksana lainnya memberikan pelayanan dengan ramah	106
Gambar 4.27.	Diagram tentang petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin	108
Gambar 4.28.	Diagram tentang petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin	109
Gambar 4.29.	Diagram tentang program Raskin dapat mengurangi masalah ekonomi	111

Gambar 4.30.	Diagram tentang masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah	112
Gambar 4.31.	Diagram tentang program mampu mempertahankan daya beli masyarakat	114
Gambar 4.32.	Diagram tentang program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan	115
Gambar 4.33.	Diagram tentang merasa terbantu dan meringankan beban hidup dengan adanya program Raskin	117
Gambar 4.34.	Diagram tentang program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin	118
Gambar 4.35.	Diagram tentang sosialisasi program Raskin sudah berjalan dengan baik	119
Gambar 4.36.	Diagram tentang masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah	121
Gambar 4.37.	Diagram tentang masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah	122
Gambar 4.38.	Grafik Distribusi Data Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin	128
Gambar 4.39.	Uji Hipotesis Pihak Kanan	118

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2. Data Hasil Penyebaran Kuisisioner
- Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Instrumen
- Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
- Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Data
- Lampiran 6. Pedoman Umum Penyaluran Raskin
- Lampiran 7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2008
- Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai wilayah teritorial cukup luas, dan masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan yang oleh karena itu Negara Indonesia sering disebut juga sebagai negara agraris. Selain ditunjang oleh kondisi alamnya yang tropis juga di wilayah Indonesia setiap tahunnya memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Tetapi kondisi yang mendukung untuk menjadi wilayah agronomi ini tidak lantas membuat masyarakat Indonesia hidup dalam pangan yang berkecukupan karena ironisnya pemerintah Indonesia masih banyak membutuhkan bantuan dari Negara lain dalam bentuk pangan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun wilayah. Sejalan dengan itu, pembangunan sudah menjadi bagian dari proses terbentuknya peradaban manusia. Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat diharapkan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk, maupun faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan

inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi melainkan juga untuk mengatasi dan memerangi kemiskinan.

Sementara itu, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan, bahkan sampai sekarang dapat dikatakan semakin memprihatinkan. Kemiskinan tercermin dari belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, tanah, sumber daya alam, air bersih, dan sanitasi, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan proses pembangunan. Sedangkan dampak dari kemiskinan yaitu jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, dan tidak adanya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas. Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan kronis dalam proses pembangunan.

Akibat adanya kemiskinan itu, maka Pemerintah membuat program untuk mengatasi kemiskinan. Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah tidaklah sedikit. Program pemerintah yang telah berjalan antara lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program Bantuan untuk

Keluarga Miskin (Gakin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dalam era pemerintahan sekarang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya. Semua itu upaya pemerintah dalam mencoba memerangi kemiskinan. Hal ini berarti pula Pemerintah telah berusaha memikirkan perubahan strategi pembangunannya yaitu salah satunya dengan menggunakan model kebutuhan pokok. Walaupun demikian, program-program tersebut tidak dapat juga mengatasi kemiskinan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara, maka pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin (Raskin), sebagaimana yang diamanahkan dalam landasan hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan (beras) dalam hal harga dan ketersediaan. Program Raskin sebagai implementasi kebijakan subsidi

pangan terarah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Pemerintah terhadap keluarga miskin. Secara Vertikal, program Raskin akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga. Secara horizontal, Raskin merupakan Transfer Energi yang mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin khususnya di Kota Tangerang terus dilaksanakan, antara lain melalui program-program kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial salah satunya yaitu Raskin. Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program dan kegiatan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang untuk tahun 2014 ini bersumber dari APBD Kota Tangerang. Adapun fasilitasi untuk distribusi raskin yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 568.000.000,- (Sumber : Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, 2015).

Guna kelancaran penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (raskin) tersebut, maka Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan, dalam pelaksanaannya melakukan upaya sosialisasi terus menerus mengenai data terbaru kepada penerima manfaat, khususnya di daerah-daerah apabila mengalami pengurangan RTS dan bekerjasama dengan aparat tingkat kecamatan, kelurahan sampai desa-desa penerima raskin. Upaya sosialisasi oleh

petugas raskin cukup penting, karena hal ini akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah Kota Tangerang berupaya untuk memperjuangkan hak masyarakat miskin melalui program penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras), sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Program penyaluran beras untuk keluarga miskin ini merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas pengelolaan program penyaluran beras untuk keluarga miskin, maka pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau Badan yang bertanggung-jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) beras untuk keluarga miskin tersebut. Pelaksanaannya di daerah, khususnya di provinsi Banten dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Banten. Adapun program penyaluran beras raskin untuk wilayah Kota Tangerang tahun Anggaran 2014 diatur dalam Keputusan Walikota Tangerang Nomor 405/Kep.41-Dinsos/2014, yaitu tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Tangerang Tahun 2014.

Untuk mengetahui alokasi pagu beras rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Walikota Tangerang Nomor 405/Kep.41-Dinsos/2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.
Alokasi Pagu Raskin Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Kecamatan	Jumlah Titik Distribusi	JML RTS	Kelurahan	JML RTS	Alokasi Pagu Per Bulan x 15 Kg/RTS	Jumlah (Rp)
Neglasari	7	7.230	Neglasari	1.267	2.610	30.408.000,-
			Karang Anyar	585	5.100	14.040.000,-
			Karangsari	1.301	5.025	31.224.000,-
			Karang Anyar	767	7.590	18.408.000,-
			Kedaung Wetan	1.471	6.855	35.304.000,-
			Kedaung Baru	644	7.365	15.456.000,-
			Selapajang Jaya	1.195	4.920	28.680.000,-

Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Tangerang Nomor 405/Kep.41-Dinsos/2014.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, fenomena pelaksanaan program Raskin untuk tahun anggaran 2014 di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Neglasari, bahwa dalam penyaluran beras untuk rumah tangga miskin masih ditemui berbagai kendala-kendala. Kendalanya bisa dari masyarakat bahkan dari aparturnya sendiri. Kelancaran penyaluran raskin sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat. Salah satu yang terpenting adalah :

Pertama kelancaran pembayaran. Keluarga penerima harus lancar membayar uang beras pada petugas di titik distribusi. Petugas titik distribusi harus lancar dan segera menyetor uang hasil penjualan beras raskin ke Dolog/Sub Dolog yang selanjutnya harus segera di setor ke pusat, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber di lapangan Bapak Abidin Ketua RT/RW 02/01 bahwa :

“....Penundaan pembayaran hasil raskin tidak dibenarkan, karena apabila ada ketidaklancaran dari salah satu titik distribusi akan menyebabkan keterlambatan penyaluran Raskin berikutnya, yang rugi adalah masyarakat. Pembayaran maupun kelengkapan administrasi Raskin harus menjadi prioritas utama sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas”. (Wawancara Tanggal 25 Januari 2016, Pukul 12.00 WIB).

Kedua, beras miskin yang disalurkan kepada RTS-PM seharusnya beras dengan kualitas baik. Akan tetapi masih saja terjadi RTS-PM tersebut kebanyakan menerima beras dengan kualitas rendah dan tidak layak dikonsumsi, beras yang diterima RTS-PM berbau apek, berkutu dan berwarna kuning, seperti keterangan informasi yang didapat dari Narasumber, yaitu Bapak Amirudin salah satu warga RT. 03/02 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

“Memang benar adanya bahwa sekira pada bulan Desember 2013 yang lalu masyarakat mengeluhkan dengan adanya kualitas beras raskin yang didistribusikan, karena beras berbau, berkutu, dan berwarna kekuning-kuningan”. (Wawancara Tanggal 27 Januari 2016, Pukul 10.15 WIB).

Kondisi sebagaimana dijelaskan oleh narasumber tersebut, tentu membuat masyarakat kecewa atas pendistribusian beras raskin dari pemerintah karena beras yang didistribusikan semestinya sudah tidak layak lagi dikonsumsi.

Ketiga, permasalahannya bukan itu saja, ini diperkuat oleh keterangan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Ramdhani sekaligus pernah menjadi Ketua RT. 01/02 Kelurahan Karang Anyar yang sedikit banyak mengetahui program kebijakan raskin, beliau menyatakan bahwa :

“Seringkali terjadi masyarakat yang membeli beras miskin tersebut bukan dari RTS-PM, tetapi masyarakat menengah dan yang mampu juga, karena orang yang benar-benar miskin mereka tetapi tidak mampu untuk membeli Raskin meskipun harganya murah hanya Rp. 1.600 per kilogram di titik distribusi. Apalagi jika beras raskin tersebut sudah didistribusikan ke masing-masing RT, harga raskin tersebut bisa mencapai Rp. 2.000/Kg setelah mendapat persetujuan dari RTS-PM karena diperhitungkan dengan

ongkos transport angkut beras dari kelurahan masing-masing RW atau RT, dan jumlah RTS-PM dengan kuota beras harus seimbang, karena jika jumlah RTS-PM lebih banyak dari Raskin yang didistribusikan maka akan banyak RTS-PM yang tidak dapat menerima jatah raskin. Hal ini akan menyebabkan kecemburuan social". (Wawancara Tanggal 26 Januari 2016, Pukul 11.30 WIB)

Keempat, selain itu program penyaluran bantuan pada keluarga miskin ternyata masih banyak ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana proses penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) banyak yang tidak tepat sasaran, seperti masyarakat yang membeli beras miskin bukan dari RTS-PM, tetapi masyarakat yang benar-benar mampu ataupun terkadang yang membeli adalah para tengkulak beras, yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan secara pribadi untuk diperjualbelikan kembali.

Hasil pengamatan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) belum seluruhnya efektif, terutama keterlambatan pembayaran dan pendistribusian raskin serta kualitas beras raskin yang merupakan suatu permasalahan dari kebijakan pemerintah. Apalagi dilihat dari aspek penyaluran, jumlah kelompok sasaran, volume beras tidak sesuai dengan jumlah RTS-PM yang ada di wilayah dan harga amat rentan terhadap kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang harusnya Rp. 1.600/per kg setelah ke titik distribusi mencapai Rp. 2.000,-, sehingga dapat dipastikan bahwa belum optimal memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada rumah tangga miskin maka dengan itu peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian untuk diuji kebenarannya secara ilmiah melalui penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **“Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengungkapkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih adanya kendala yang dihadapi yaitu ketidاكلancaran pembayaran di salah satu titik distribusi. Hal ini tentu menyebabkan keterlambatan penyaluran Raskin berikutnya, mengingat pembayaran maupun kelengkapan administrasi Raskin harus menjadi prioritas utama sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan kepada publik.
2. Beras Raskin yang disalurkan kepada RTS-PM kualitasnya kurang baik dan tidak layak dikonsumsi, beras yang diterima seringkali berbau apek, berketu dan berwarna kuning.
3. Distribusi penyaluran beras untuk keluarga miskin kenyataannya masih ditemui masyarakat yang membeli bukan dari RTS-PM, selain itu beras yang didistribusikan belum tepat harga dan tepat waktu, harga raskin yang dibeli bisa mencapai Rp. 2.000/Kg dengan alasan diperhitungkan biaya ongkos transport dan angkut.

4. Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin masih kurang tepat, kenyataannya seringkali terjadi masyarakat yang membeli beras miskin tersebut bukan dari RTS-PM, tetapi masyarakat menengah dan yang mampu ataupun yang membeli adalah para tengkulak beras yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan semata.

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini peneliti membatasi ruang lingkup kajian yang lebih diarahkan kepada kajian mengenai implementasi penyaluran beras raskin di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program raskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang” ?**

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya bidang kajian kebijakan publik.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan khususnya Tim Penyaluran Raskin pemerintah tingkat bawah, yaitu pemerintah di lingkungan Kecamatan Neglasari untuk melakukan penataan terhadap manajemen distribusi penyalurannya agar tepat sasaran.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, yaitu point yang menjelaskan ruang lingkup masalah yang diteliti dan alasan penelitian yang dilakukan. Identifikasi masalah, yaitu mengkaitkan antara tema (topik/judul) dengan fenomena yang diteliti. Perumusan masalah, yaitu mendefinisikan rumusan masalah yang ditetapkan dalam bentuk konsep dan definisi operasional. Tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan isi rumusan masalah.

Kegunaan penelitian, yaitu menjelaskan manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap temuan yang didapat dari kegiatan penelitian di lapangan. Sistematika, yaitu menjelaskan uraian mengenai masing-masing bab secara keseluruhan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian deskripsi teori yang menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan pokok masalah dan objek penelitian sesuai dengan topik yang dikaji. Kerangka berpikir, yaitu berisi tentang teori-teori yang menjadi pedoman dari deskripsi teori yang telah disajikan untuk mendukung penyusunan penulisan skripsi, serta menggambarkan kerangka berpikir sesuai alurnya. Dan selanjutnya hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari : Metode penelitian, yaitu menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian, yaitu menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen. Populasi dan sampel, yaitu menentukan karakteristik objek data yang digunakan. Teknik pengolahan dan analisis data, yaitu menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti. Tempat dan waktu, yaitu menjelaskan kondisi pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari : deskripsi objek penelitian, yang meliputi lokasi penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan data penelitian. Deskripsi data, yaitu menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis penelitian. Interpretasi hasil penelitian, yaitu proses penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Pembahasan, yaitu mengkaji secara lebih lanjut terhadap hasil analisis data yang terkait dengan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan hasil penelitian secara utuh, menyeluruh, sistematis, dan mudah dipahami. Dan selain itu bab penutup ini berisikan tentang saran, yaitu sumbangan pemikiran dari peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan baik itu secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak tertentu yang memang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang literatur-literatur yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian yang dianggap relevan dengan pokok masalah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1. Kajian Teoritis

Kajian teoritis adalah landasan teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek penelitian. Sebagai alat, teori tersebut dipilih yang paling memadai, tepat, baik dalam kaitannya dengan hakikat penelitian. (Prastowo. 2011 : 169). Adapun teori-teori yang peneliti gunakan yaitu teori kebijakan publik sebagai teori utama untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah terkait implementasi program beras rumah tangga miskin, teori implementasi kebijakan, konsep keluarga miskin dan kemiskinan dan petunjuk teknis pelaksanaan distribusi Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat sebagai obyek dalam penelitian ini yang mendeskripsikan secara garis besar mengenai konsep implementasi program beras rumah tangga miskin.

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam. Namun secara umum kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Dye dalam Santosa (2009:27) menjelaskan : “Kebijakan publik

adalah pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. Adapun salah satu definisi mengenai kebijakan publik dari Eyestone dalam Winarno (2007:17) bahwa : “Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam buku yang sama mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Berbeda dengan Winarno (2007:17) dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, ia mempergunakan istilah kebijakan : “Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Lebih lanjut Jones dalam Winarno (2007:18), istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Friedrich dalam Winarno (2007:17) mengatakan bahwa :

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut di atas menunjukkan bahwa

unsur tujuan, sasaran dan cara-cara bagaimana tujuan itu harus dicapai merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah.

Menurut Dye dan Anderson dalam Agustino (2008:4) : “Ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Pertama, pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reason*), Kedua, pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*). Ketiga, pertimbangan atau alasan politis (*political reasons*)”.

Sedangkan menurut Anderson dalam Agustino (2008:5), implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
4. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa : 1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah; 2) kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu; dan 3) kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Konsep teori Anderson dalam Abidin (2002:41) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan di dasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Beberapa ciri dari kebijakan sebagaimana dimaksud adalah suatu keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Orang mengenal sesuatu berdasarkan keterangan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan. Tanpa mengetahui ciri-ciri kebijakan, maka sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi.

2.1.3. Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Menurut Sunggono (2004:23) mengemukakan :

- Tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :
1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator);
 2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator);
 3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator);
 4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

Untuk merujuk kepada konsekuensi kebijakan sebagaimana dimaksud, Molan dalam Nugroho (2004:264) mengemukakan :

Setiap kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme dan untung rugi. Pragmatisme lebih dekat dengan *goal setting theory*, yakni bahwa setiap tindakan harus mengacu kepada suatu tujuan. Pragmatisme harus bersifat etis dan strategis. Bersifat etis artinya sifat pragmatis ditujukan untuk kepentingan publik dan bukan elit. Bukan pula sekelompok atau golongan orang saja.

Konsep kualitas etis dari pragmatisme di atas, wajib menjadi pertimbangan karena pragmatisme dapat dengan mudah menjadi milik dari elit politik atau pemegang kendali pemerintah atas nama kepentingan rakyat banyak, padahal atas nama kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini merupakan tantangan terberat mengingat setiap penguasa pasti berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya selama mungkin, baik untuk keuntungan pribadi atau obsesi individualnya.

Sementara itu dalam Reinventing Pembangunan Dwidjowijoto dalam Nugroho (2004:266) menjelaskan sebagai berikut :

Pragmatisme tujuan strategis kebijakan mengacu kepada tiga ukuran :

1. Bahwa tujuan kebijakan secara umum adalah untuk menjadikan rakyat berdaya. Berdaya artinya mempunyai kemampuan untuk membangun diri sendiri (secara individual maupun kelompok) tanpa terlalu banyak memerlukan uluran tangan pemerintah.
2. Mengacu kepada konteks tantangan saat ini dan hari depan. Mengingat kemerosotan suatu bangsa khususnya di Indonesia sendiri disebabkan masyarakatnya diberi daya dan kemampuan, tetapi daya dan kemampuan untuk hidup di jaman pra-globalisasi. Kebijakan subsidi, proteksi, tidak responsive pasar, kurang mengakomodasi desakan demokrasi, curiga kepada *civil society*, dan sejenisnya adalah kebijakan yang tidak kontekstual.
3. Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tujuan strategis ini setara dengan prinsip pengelolaan manajemen, yakni optimalisasi risorsos atau sumberdaya.

Jika dipahami, maka pembangunan hingga saat ini lebih banyak dipahami

sebagai sebuah momen politis dan historis daripada momen manajemen. Karena pembangunan dipahami sebagai sebuah “isme-isme” daripada sebuah proses manajerial yang melibatkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset atau sumber-sumber daya yang tersedia.

Melihat kenyataan-kenyataan yang dihadapi saat ini, Nugroho (2004:269) mengemukakan beberapa prinsip pokok yang dapat dipergunakan sebagai tujuan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Prinsip kerjasama tim; kerjasama tim harus ada dua tingkat. Pertama tingkat administrasi publik, yaitu melibatkan eksekutif dan legislative serta perangkat pendukung di daerah.
2. Prinsip pengkreasian nilai; bahwa hasil akhir dari proses kerjasama etim adalah kemanfaatan optimum bagi para pemegang kebijakan, yaitu rakyat di daerah.
3. Prinsip kesinambungan; bahwa siapapun kelak yang menjadi penguasa baru, tugas pertamanya bukan membongkar kembali bangunan yang dibuat pendahulunya, melainkan melanjutkan atau minimal mengkapitalisasi aset produktif yang ditinggalkan pendahulunya.
4. Konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dimulai dari visi dan misi.

Oleh karena itu, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang bisa membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyatnya, karena pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan mekanisme. Dimana mekanisme ini haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya.

2.1.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, menurut Winarno (2007:144), yaitu :

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Sedangkan implementasi pada sisi lain, Winarno (2007:145), yaitu :

Suatu fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi yang dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Bertolak dari konsep tersebut, maka pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program. Sekalipun implementasi merupakan fenomena kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Adapun pengertian dari implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009:131) mendefinisikan : “Implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dalam Kamus Webster yang dikutip Solihin (2005:65), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Dari konteks pandangan tersebut, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang

sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2005:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni, kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.1.5. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Menurut Islamy (2007:102) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan program penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) termasuk kebijakan yang bersifat *non-self-executing*, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuannya tercapai.

Menurut definisi para ahli lainnya, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin (2005:36) mengemukakan bahwa :

Sejumlah tahap implementasi yaitu sebagai berikut

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
2. Menentukan standar pelaksanaan;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal;
2. Melakukan pemantauan ;
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, dengan mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada

implementasi kebijakan negara.

2.1.6. Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas. Lebih jelasnya menurut Kusumanegara (2010:81) kalangan aktor dimaksud, yaitu :

1. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
2. Badan Legislatif, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.
3. Lembaga Peradilan, dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
4. Kelompok Kepentingan, dikarenakan dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.
5. Organisasi komunitas, dalam hal ini adalah masyarakat baik individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai obyek dan atau subyek program.

Dari berbagai aktor yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok yang berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

2.1.7. Unsur-unsur Implementasi

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006 : 28) sebagai berikut:

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006:27) : Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa : *"Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect"*.

Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31), yaitu :

A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets.

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik dalam Tachjan (2006: 35) terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan strukturstruktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

3. Target group atau Kelompok Sasaran.

Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik. Unsur yang terakhir dalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: “*Target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”.

Berdasarkan penelitian konsep teori yang dikemukakan di atas, berkaitan dengan adanya kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran, yaitu : besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

2.1.8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, baik terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, metoda, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumberdaya manusia sebagai

implementor mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009:75) ada enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai standard dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya.
4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Faktor ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak;

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Akan tetapi keberhasilan suatu kebijakan yang mempengaruhi kinerja implementasi sangat ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar tentu saja akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian ditentukan pula oleh tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja optimal. Lalu ditentukan juga oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Edwards dalam Nawawi (2009: 80) bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor, yakni; “(1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi”.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan tidak dapat diwujudkan dan memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan tidak fleksibel.

Keempat faktor di atas, secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.

Model implementasi yang dikembangkan oleh Cheema dalam Subarsono (2010: 83) mengemukakan ada lima faktor yang dapat digunakan untuk analisis implementasi kebijakan program-program pemerintah. Faktor ini mempengaruhi kinerja suatu program kebijakan publik pemerintah, yaitu :

1. **Kondisi lingkungan:**
 - a. Tipe sistem politik
 - b. Struktur pembuat kebijakan
 - c. Karakteristik struktur politik lokal.
 - d. Kendala sumberdaya.
 - e. Sosio-kultur.
 - f. Derajat keterlibatan para penerima program.
 - g. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.
2. **Hubungan antar organisasi:**
 - a. Kejelasan dan konsisten program.
 - b. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas.
 - c. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi.
 - d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi.
 - e. Efektivitas jejaringan untuk mendukung program.
3. **Sumber daya organisasi:**
 - a. Kontrol terhadap sumber dana.
 - b. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program.
 - c. Ketepatan alokasi anggaran.
 - d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran.
 - e. Dukungan pemimpin politik pusat.
 - f. Dukungan pemimpin politik lokal.
 - g. Komitmen birokrasi.
4. **Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana:**
 - a. Keterampilan teknis, manajerial dan politis petugas.

- b. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan.
 - c. Dukungan dan sumberdaya politik instansi.
 - d. Sifat komunikasi internal.
 - e. Hubungan baik antar instansi dengan kelompok sasaran.
 - f. Hubungan baik antar instansi dengan pihak di luar pemerintah dan NGO.
 - g. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan.
 - h. Komitmen petugas terhadap program.
 - i. Kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.
5. **Kinerja dan Dampak:**
- a. Tingkat sejauhmana program tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Adanya pertumbuhan kemampuan administrasi pada organisasi lokal.
 - c. Berbagai keluaran dan hasil yang lain.

Sedangkan Teori Grindle dalam Purwanto (2012:91) mengemukakan sebagai berikut :

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua faktor yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Untuk lebih jelasnya, yaitu :

1. **Isi kebijakan (*Content of Policy*)**. Isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu;
 - a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan publik (*Interest Affected*);
 - b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group* (*Type of Benefit*);
 - c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dicapai oleh kebijakan (*Extent of Change Envension*);
 - d. Apakah letak sebuah program sudah tepat dalam pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*);
 - e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci (*Program Implementor*); dan
 - f. Sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (*Resources Committed*).
2. **Lingkungan kebijakan (*Context of Policy*)**. Faktor lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut;
 - a. Seberapa besar kekuatan, kepentingan-kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (*Power, Interest and Strategi of Actor Involved*);
 - b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa (*Intitution and Regime Characteristic*);

- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran dari para pelaksana (*Compliance and Responsiveness*) .

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle di atas, kedua variabel tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana pengukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang mana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu :
 - a. Imfak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Kemudian Meter dan Horn dalam Agustino (2006:153) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut: “Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan kebijaksanaan”.

Lebih lanjut menurut Metter dan Horn (Winarno, 2012:158) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut, meliputi :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
Konsep implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level

warga maka agak sulit memang untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya
Keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.
3. Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan sangat cocok dengan para agen pelaksana.
4. Sikap dan kecenderungan para petugas
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil komunikasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

Oleh karena itu, melalui model-model yang dikembangkan oleh para ahli di atas serangkaian tindakannya harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan demi kepentingan

seluruh masyarakat. Karenanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor, sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Agar nilai-nilai yang dianut dapat dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang diimplementasikan.

Selain dari pada itu, maka model kebijakan yang harus dipilih adalah harus sesuai dengan kebutuhan, yang paling penting yaitu implementasi kebijakan haruslah menampilkan efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Dalam kaitan ini peneliti menerapkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh model kebijakan dari Meter dan Horn dengan indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi dan politik. Dengan konsep teori ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi, karena satu hal penting bahwa isi implementasi kebijakan yang diterapkan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri secara maksimal dan benar.

2.1.9. Konsep Keluarga Miskin dan Kemiskinan

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu

menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (BAPPENAS dalam BPS, 2002).

Menurut teori Noor (2007:80) menjelaskan : “Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini, dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat”.

Sedangkan konsep teori Hartomo (2004:86) menjelaskan bahwa : “Fungsi ekonomi dalam keluarga artinya bagi kelangsungan hidupnya, keluarga harus mengusahakan penghidupannya. Di dalam masyarakat yang sederhana pembagian kerja dalam kerjasama ekonomi dilakukan antara anggota-anggota keluarga”.

Jadi, yang dimaksud keluarga miskin suatu bagian dari masyarakat terkecil yang mempunyai hubungan secara biologis yang hidup dan tinggal dalam rumah yang standar kehidupan ekonominya rendah atau tingkat pendapatannya relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok seperti, sandang, pangan maupun papan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat.

Menurut Salim dalam Noor (2007:288) : yang dimaksud dengan

kemiskinan adalah : “Suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok”.

Menurut Sayogya Dalam Munandar (2006:228) : “Garis kemiskinan dinyatakan dalam Rp./tahun, ekuivalen dengan nilai tukat beras (kg/orang/bulan, yaitu untuk desa 320kg/orang/tahun dan untuk kota 480 kg/orang/tahun)”.

Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan sebagainya.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self employed), berusaha apa saja.
5. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi seseorang/keluarga dikatakan miskin apabila melihat empatbelas indikator yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
5. Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak

terlindungi/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ poliklinik.
 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0.5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD.
 14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), seperti: Sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
- Sumber : (suyatno.blog.undip.ac.id/files/2009/11/13-indikator-kemiskinan.pdf pada Sabtu, 07 Januari 2012).

Berdasarkan uraian di atas, masalah kemiskinan dewasa ini memang menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Contohnya di sebagian wilayah Asia dan Afrika, sangat berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Sebagian besar rakyat di kawasan ini masih menyandang kemiskinan. Sementara bagi negara maju, mereka pun sangat tertarik membahas kemiskinan. Ketertarikan itu karena di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka.

Oleh karena itu, untuk tercapainya keberhasilan program pendistribusian beras ini, maka bagaimana penyelenggara pemerintahan mengaktifkan sumber-sumber data dan sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan program dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaatnya.

2.1.10. Pelaksanaan Distribusi Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat

Program Raskin tahun 2014 mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

Untuk memberikan gambaran singkat terkait dengan pelaksanaan program kebijakan Raskin di Kota Tangerang khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat, yaitu sebagai berikut :

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dalam melaksanakan program kebijakan raskin adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3) Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD.

Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- a) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- b) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- c) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- d) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN), berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian terdahulu atau yang relevan seperti dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Penelitian tentang Hubungan Efektivitas Pengelolaan Beras Raskin dengan Kesejahteraan Rakyat di Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, yang dilakukan oleh Diah Anjaryani pada Tahun 2012, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu uji koefisien korelasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa efektivitas pengelolaan beras raskin yang dibagikan ke masyarakat dan harga raskin yang dibebankan kurang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga program ini kurang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat di Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, tingkat hubungan yang dicapai hanya 0,39 atau 39%. Artinya interpretasi tingkat hubungan yang dicapai termasuk dalam kategori rendah. Adapun relevansi dengan penelitian sekarang atau persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diah Anjaryani adalah variabel independen (efektivitas pengelolaan beras raskin) dalam penelitian ini yaitu implementasi program beras rumah tangga miskin (Raskin).

2. Penelitian tentang Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan Nasional Untuk Program Raskin suatu Studi Kasus : Program Raskin di Kecamatan Jalaksana Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Heri Rizal pada tahun 2013 seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan informan dan teknik analisisnya dengan model triangulasi. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perberasan nasional dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Hasilnya telah cukup banyak kemajuan yang dicapai kendati tidak sedikit pula kekurangan dan kelemahan dalam proses penyaluran. Artinya implementasi kebijakan perberasan nasional dapat dikelola dengan hasil yang baik yang realisasinya distribusi beras itu untuk warga miskin. Relevansi dengan penelitian sekarang atau persamaan penelitian yang dilakukan oleh Heri Rizal adalah membahas tentang kebijakan perberasan nasional yang tujuannya adalah sama untuk program Raskin seperti kajian dalam penelitian ini.
3. Penelitian tentang Evaluasi Distribusi Program Beras Miskin (RASKIN) suatu Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Andri Winandra pada Tahun 2012 seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik kualitatif untuk menjaring data menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan sejumlah informan dan teknik analisisnya adalah dengan model triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa program raskin mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, meskipun masih ada kendala yang dihadapi di lapangan mengenai prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum raskin Tahun 2011. Relevansi dengan penelitian sekarang atau persamaan peneliti yang dilakukan oleh Andri Winandra adalah Evaluasi Distribusi Program Beras Miskin dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu implementasi program Raskin.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono,2008:65). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui penjelasannya pada uraian di bawah ini :

Suatu kebijakan program yang diimplementasikan oleh pemerintah, yaitu pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

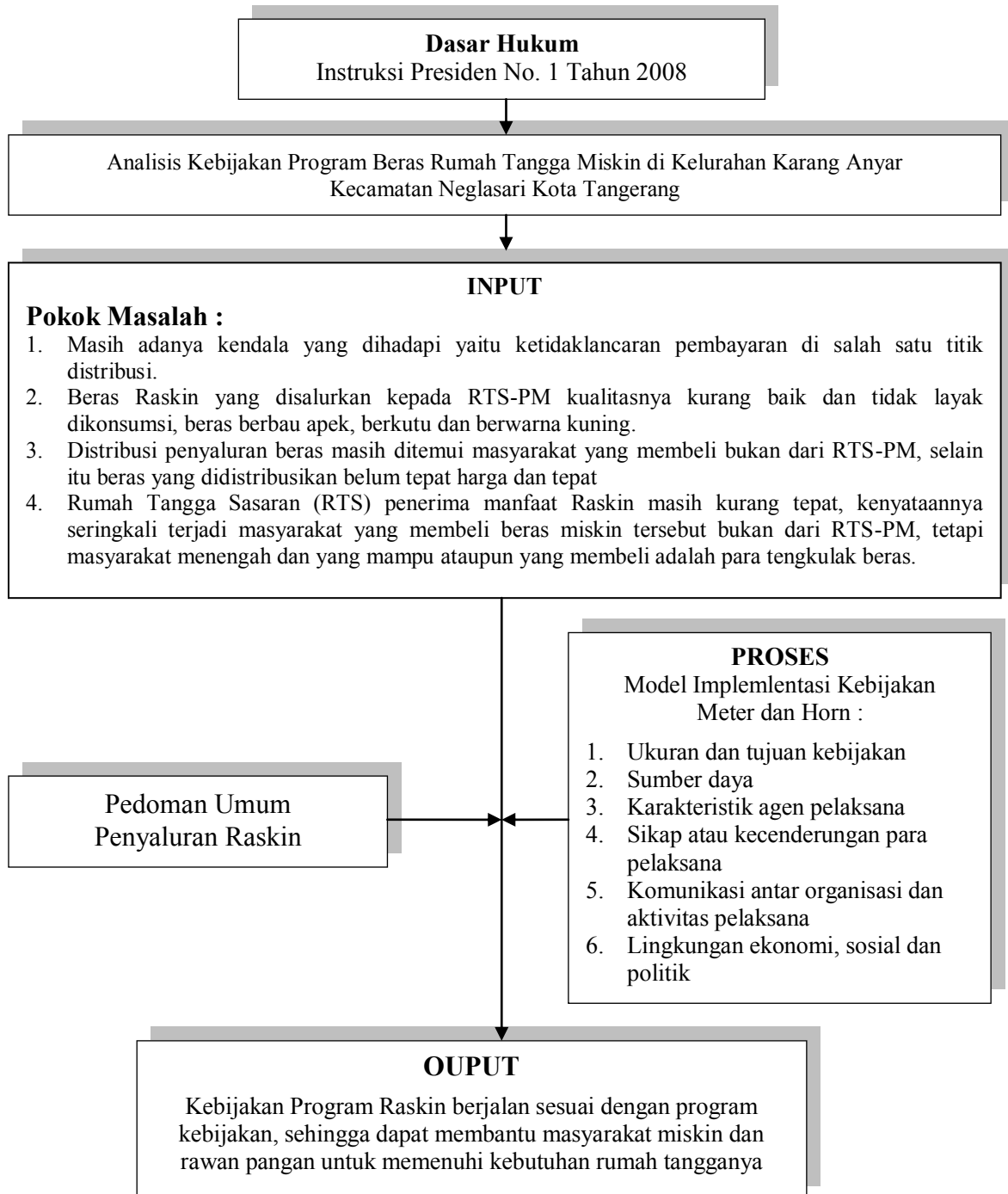
Kebijakan yang diimplementasikan ini memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan, tanpa adanya tahap pengimplementasian yang dilaksanakan maka program kebijakan yang telah dirumuskan secara resmi oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil.

Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar

Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Dari pengamatan/observasi yang dilakukan peneliti di lokus penelitian, masih banyak ditemui hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Raskin tersebut. Diantaranya yaitu karena program ini tidak tepat sasaran, kualitas beras raskin tidak layak untuk dikonsumsi, tidak meratanya dalam pembagian Raskin, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan dari pihak instansi Pemerintah dan ataupun para pelaksana yang terkait di lapangan. Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan kebijakan program Raskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang adalah dengan menerapkan beberapa variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. karena indikator-indikator tersebut setidaknya mampu menjawab permasalahan yang ada terkait dengan kebijakan program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya dengan subindikator sumber daya manusia, sumberdaya finansial, sumber daya waktu. karakteristik agen pelaksana dengan sub indikator organisasi formal, ketegasan para pelaksana. sikap atau kecenderungan para pelaksana dengan sub indikator menerima adanya program kebijakan raskin, dan menolak adanya program kebijakan raskin. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dengan indikator koordinasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan indikator lingkungan eksternal yang mempengaruhi.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai konsep kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

Jika teori Meter dan Horn dilaksanakan dengan baik sudah dipastikan Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang akan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan program raskin yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, dengan konsep kerangka pikir yang dikemukakan di atas, maka diharapkan setiap program yang dilaksanakan sesuai perubahan yang diinginkan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementator dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2011: 63). Oleh karena itu, jawaban ini dinyatakan hanya sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Mengacu pada uraian sebelumnya yang telah menjelaskan pokok rumusan masalah yang dihadapi, maka penelitian mengenai analisis Kebijakan Program

Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang peneliti menentukan hipotesis deskriptif sebesar 70% dari nilai ideal 100%. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis ini berdasarkan data sampel dan diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan jumlah populasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

“Implementasi Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang berjalan sesuai dengan kebijakan Raskin apabila mencapai angka minimal 70%”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Analitis artinya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran. Sedangkan analisa deskriptif dilakukan terutama ditujukan untuk pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang terutama masalah-masalah Implementasi Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan mengenai gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2009:36). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang ada kedalam satuanangka. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Lokasi dipilih berdasarkan pengamatan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggal di daerah tersebut masih memprihatinkan. Pasaunya, angka kemiskinan di wilayah itu masih tertinggi se-Kota Tangerang, meski letaknya sangat berdekatan dengan Bandara Soekarno Hatta (Soetta), ironisnya, Kecamatan Neglasari masih menjadi wilayah termiskin di kota ini. Sementara itu pendistribusian raskin di lihat dari efektivitasnya bahwa ukuran keberhasilan program raskin masih tidak tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi dalam pelaksanaannya.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan

dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah, seperti dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa kebijakan program raskin merupakan program nasional yang bertujuan membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin melalui kebijakan pemerintah

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional kebijakan raskin dilihat dari :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
 - a. Tingkat keberhasilan kebijakan program raskin
 - b. Tujuan kebijakan program raskin
2. Sumber daya
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sumber daya finansial
 - c. Sumber daya waktu
3. Karakteristik agen pelaksana
 - a. Organisasi formal
 - b. Ketegasan para pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
 - a. Menerima adanya kebijakan program raskin
 - b. Menolak adanya kebijakan program raskin
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
 - a. Petugas berkoordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program
 - b. Petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

- a. Program Raskin mengurangi masalah kesenjangan ekonomi
- b. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Raskin
- c. Program Raskin disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat
- d. Masyarakat memandang positif tentang Program Raskin dari Pemerintah

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008:119). Instrumen penelitian digunakan untuk nilai variabel yang akan diteliti, dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang akan diteliti yaitu tentang implementasi program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Berikut ini akan disajikan tentang instrumen dan kisi-kisi penelitian, diantaranya:

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No. Item
Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan	1. Ukuran dan tujuan kebijakan	1. Tingkat keberhasilan 2. Tujuan kebijakan	1, 2,3 4,5,6

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No. Item
Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	2. Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya finansial 3. Sumber daya waktu	7, 8 9, 10 11,12, 13, 14
	3. Karakteristik agen pelaksana	1. Organisasi formal 2. Ketegasan para pelaksana	15, 16 , 17 18, 19
	4. Sikap dan kecenderungan para pelaksana	1. Menerima adanya kebijakan program raskin 2. Menolak adanya kebijakan program raskin	20, 21, 22 23, 24
	5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	Ada koordinasi antar organisasi pelaksana : 1. Petugas berkoordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program 2. Petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana	25 26
	6. Lingkungan ekonomi sosial	Lingkungan eksternal yang mempengaruhi : 1. Program Raskin mengurangi masalah kesenjangan ekonomi 2. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Raskin 3. Program Raskin disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat 4. Masyarakat memandang positif tentang Program Raskin dari Pemerintah	27, 28, 29, 30 31, 32 33 34, 35

Adapun secara teknis dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
2. Wawancara adalah suatu cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. (Sugiyono, 2007:138).
3. Kepustakaan adalah Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.
4. Pengamatan/observasi. yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini pengamatan/observasi yang dilakukan adalah nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:93). Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan ciri tertentu yang akan diukur Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pernyataan diberikan jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut ini

Tabel 3.2
Skoring Jawaban Terhadap Item Instrumen Pernyataan

Pilihan Jawaban	Skor Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Abstain	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2008 : 55)

3.6. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:90). Mengingat penelitian ini terkait dengan kebijakan program raskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, maka peneliti menetapkan populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah penduduk/masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerimaan (RTS-PM) program Raskin di Kelurahan Karang Anyar berdasarkan sumber data yang penulis peroleh di lapangan, yaitu sebanyak 767 RTS-PM (Lampiran Keputusan Walikota Tangerang Nomor 405/Kep.41-Dimsos/2014). Akan tetapi dari sekian banyak populasi yang ada tidak mungkin peneliti untuk mendata satu persatu RTS-PM yang ada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, sehingga jumlah sampel yang dijadikan responden secara keseluruhan lebih sederhana.

Penetapan ukuran sampel menggunakan Rumus Slovin (Bungin, 2009 : 105), sebagai berikut :

$$N = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

e = Standar error dari kemampuan sampel dalam mewakili populasi
(dalam hal ini standar error 5%)

Adapun perhitungan besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{767}{1 + 767 \cdot (0.05)^2}$$

= 262,89 atau dibulatkan menjadi = 263 orang.

Sedangkan untuk mengetahui ukuran sampel peneliti menerapkan teknik

proportion cluster sampling sebagai berikut :

$$n_1 = \frac{N_1}{N} \times n$$

Keterangan :

n_1 = Ukuran sampel masing-masing

N_1 = Ukuran besarnya populasi pada masing-masing

N = Jumlah populasi

n = Ukuran besarnya sampel

Adapun perhitungan besarnya sampel yang mewakili dari 263 sampel, yaitu

sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perhitungan Sampel Yang Mewakili Dalam Penelitian

Jumlah Populasi		Perhitungan	Hasil	Sampel
RT. 01/01	43	$43/767 \times 263$	14,74	15
RT. 02/01	48	$48/767 \times 263$	16,46	16
RT. 03/01	36	$36/767 \times 263$	12,34	12
RT. 01/02	52	$52/767 \times 263$	17,83	18
RT. 02/02	56	$56/767 \times 263$	19,20	19
RT. 03/02	73	$73/767 \times 263$	25,03	25

RT. 04/02	38	$38/767 \times 263$	13,03	13
RT. 01/03	54	$54/767 \times 263$	18,52	19
RT. 02/03	52	$52/767 \times 263$	17,83	18
RT. 03/03	55	$55/767 \times 263$	18,86	19
RT. 01/04	41	$41/767 \times 263$	14,06	14
RT. 02/04	63	$63/767 \times 263$	21,60	22
RT. 01/05	52	$52/767 \times 263$	17,83	18
RT. 02/05	51	$51/767 \times 263$	17,49	17
RT. 03/05	53	$53/767 \times 263$	18,17	18
Total				263

Sumber : Teknik Menentukan Ukuran Sampel Sugiyono (2011:104).

Dengan demikian, maka sampel yang mewakili dalam penelitian ini yaitu sebanyak 263 orang responden. Dimana sampel tersebut berdasarkan perhitungan Rumus Slovin.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahapan dimana dipersiapkan, diklasifikasikan dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya, yaitu analisis data. Sebelum menganalisis data, maka peneliti terlebih dahulu menerapkan teknik pengolahan data yang merupakan kaitan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut :

1. **Coding**. Tahap memberi kode setiap jawaban (variabel) yang terdapat dalam kuisisioner, dengan memberikan kode pada setiap jawaban/variabel dengan menggunakan simbol angka.

2. *Editing*, yaitu tahap dimana data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner sebelum diolah perlu diperiksa keabsahannya terlebih dahulu, apakah data tersebut layak digunakan.
3. *Tabulating*, tahap pekerjaan membuat rincian data tabel dari semua jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam rekapitulasi tabel.

3.7.2. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, dimana statistik hanya digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk menganalisis Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Ketepatan hasil dari sebuah pengujian dalam penelitian tergantung dari instrumen penelitian yang digunakan. Oleh karena itu instrumen penelitian harus benar-benar memenuhi persyaratan validitas. Agusyana (2011:35) menjelaskan sebuah instrumen dikatakan valid atau sah jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang akan diukur. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran.

Sementara itu Gay (1983) dalam Sukardi (2007:121) suatu instrument dapat dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah Uji validitas atau yang kita sebut sebagai uji kesahihan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu instrumen atau alat ukur yaitu kuesioner untuk mampu melakukan fungsinya. Instrumen penelitian yang baik tentu saja instrumen yang valid, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Kevalidan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran.

Sedangkan menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Menurut Agusyana (2011:37) uji validitas ini termasuk ke dalam validitas kriteria, pendekatan ini dilakukan dengan mengkorelasi hasil tes (berupa skor data) dengan total skornya, rumus yang digunakan adalah :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum x_1 y_1 - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi Product Moment
- ΣX = Jumlah skor dalam sebaran X
- ΣY = Jumlah skor dalam sebaran Y
- ΣXY = Jumlah hasil skor X dan Y yang berpasangan
- ΣX^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- ΣY^2 = Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y
- N = Jumlah sampel

2. Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2008:137), instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Sedangkan menurut Nazir (2003:133) reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Uji reliabilitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden.

Dengan demikian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kepercayaan itu dalam bentuk keandalan instrumen yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen

digunakan pada subjek penelitian. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat, akurat dan mantap.

Apabila koefisien reliabilitas instrumen dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi melalui teknik alpha cronbach, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30. Menurut Sugiyono (2011:132) koefisien Alfa Cronbach dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ \frac{1 - M(k-M)}{ks_t^2} \right\}$$

Dimana :

r_i = realibilitias instrumen

k = jumlah item dalam instrumen

M = mean skor total

S_1^2 = varians total

3. Uji t test

Untuk menguji hipotesis penelitian terkait dengan Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, maka peneliti menggunakan uji t test satu sampel (Sugiyono, 2008:178), dengan rumus sebagai berikut :

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Tangerang, gambaran umum dapat dipaparkan dibawah ini.

4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Tangerang

Banten merupakan salah satu provinsi termuda yang ada di Indonesia. Banten berdiri pada tanggal 4 oktober 2000 sesuai dengan UU No 23 tahun 2000, serta dengan luas wilayah 9.1670,70 km² dan populasi totalnya 10.644.030 jiwa dengan kepadatan 1.161,91 km² dari jumlah tersebut ada kenaikan dari tahun ke tahun yang tersebar ke 4 kabupaten dan 4 kota yang berada di Banten. Tingginya jumlah penduduk dari tahun ke tahun karena adanya mobilitas penduduk dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Provinsi Banten. Menyebabkan tingginya kebutuhan lapangan kerja namun itu semua tidak di dukung dengan peningkatan kualitasnya seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, bila faktor-faktor tersebut ditingkatkan maka perekonomian pun akan naik dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Banten. Ironis kiranya, Provinsi yang bisa di bilang cukup dekat dengan Ibu Kota RI namun masih ada masyarakatnya yang hidup terbelakang. Masih banyak yang harus dibenahi di Provinsi Banten mulai dari pemerintahan provinsi sampai pemerintah kabupaten/kota, salah satunya Kota Tangerang yang menjadi salah satu penyangga perekonomian Banten.

Letak Kota Tangerang Secara geografis Kota Tangerang terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS).

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug (8,769 Km²), Larangan (9,611 Km²), Karang Tengah (10,474Km²), Cipondoh ((17,91 Km²), Pinang (21,59 Km²), Tangerang (15,785 Km²), Karawaci (13,475 Km²), Jatiuwung (14,406 Km²), Cibodas (9,611 Km²), Periuk (9,543 Km²), Batuceper (11,583 Km²), Neglasari (16,077 Km²), dan Benda (5,919 Km²), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Visi dan Misi Kota Tangerang tahun 2013-2018:

“Terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah”

Dengan Misi yaitu:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan system birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdayasaing tinggi
3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi.
4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Adapun peta Kota Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1

Peta Kota Tangerang

4.1.2. Profil Kecamatan Neglasari

Kecamatan Neglasari yang merupakan salah satu dari tigabelas kecamatan yang ada di Kota Tangerang menjadi tempat penelitian mengenai Program Kebijakan Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) karena Kecamatan Neglasari merupakan Kecamatan yang jumlah penduduk miskinnya banyak. Akan tetapi itu bukannya menjadi faktor paling penting dalam pelaksanaan program tersebut.

Kecamatan Neglasari di bentuk berdasarkan Perda No.16 Tahun 2000 tentang Pembentukan 7 kecamatan di Kota Tangerang. Kecamatan Neglasari memiliki luas wilayah 16.077 km², serta memiliki 85.844 jiwa penduduk yang tersebar kedalam 22.148 KK. Sebagai daerah yang berdekatan dengan lokasi kantor Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kota Tangerang (\pm 1 km), dan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memberikan pengaruh yang signifikan

dalam perkembangan di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kecamatan Neglasari secara lebih dinamis dibandingkan perkembangan masyarakat di wilayah lainnya. Karakteristik masyarakat Kecamatan Neglasari sudah sangat majemuk layaknya masyarakat Ibukota Jakarta. Keberadaan secara geografis ini sesungguhnya memerlukan perhatian yang lebih seksama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan di wilayah ini, khususnya dalam merespon perkembangan yang cepat yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Neglasari yang dinamis dan sudah sangat majemuk ini. Adapun kondisi secara geografis wilayah Kecamatan Neglasari berada pada ketinggian tanah 1,5 m dari permukaan laut, curah hujan 0,5 mm/tahun, suhu rata-rata 23° C – 35° dengan batas wilayah :

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kecamatan Neglasari

Sebelah Barat	Sungai Cisadane, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
Sebelah Timur	Kecamatan Batuceper Kota Tangerang
Sebelah Utara	Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang
Sebelah Selatan	Sungai Cisadane



Gambar 4.2

Peta Kecamatan Neglasari

Secara administratif, Kecamatan Neglasari terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan, 50 Rukun Warga (RW), dan 243 Rukun Tetangga (RT) yang di jelaskan dalam tabel 4.2 berikut:.

Tabel 4.2

Kelurahan di Kecamatan Neglasari

No	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Kecamatan	Kota
1	Neglasari	8	45	Neglasari	Tangerang
2	Mekarsari	6	33	Neglasari	Tangerang
3	Karangsari	15	55	Neglasari	Tangerang
4	Karang Anyar	7	33	Neglasari	Tangerang
5	Kedaung Wetan	4	21	Neglasari	Tangerang
6	Kedaung Baru	3	16	Neglasari	Tangerang
7	Selapajang Jaya	7	40	Neglasari	Tangerang

4.1.3. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Tangerang

Dinas Sosial Kota Tangerang adalah perangkat daerah atau instansi yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang dibentuk berdasarkan Perda No 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

1. Sumber Daya Organisasi

Pegawai Dinas Sosial Kota Tangerang berjumlah sebanyak 33 orang, yang terdiri dari 22 orang PNS dan 11 orang Non PNS. Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Perda No 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas: 1 orang.
- b. Sekretariat; 1 orang membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 1 orang.
 - 2) Sub Bagian Keuangan; 1 orang.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan; 1 orang.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 1 orang membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial; 1 orang.
 - 2) Seksi Jaminan Sosial; 1 orang.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial; 1 orang membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; 1 orang.
 - 2) Seksi Rehabilitasi Orang Dengan Disabilitas; 1 orang
 - 3) Seksi Rehabilitasi Eks Penyandang Penyakit Sosial; 1 orang.

- e. Bidang Pemberdayaan Sosial; 1 orang membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; 1 orang.
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin; 1 orang.
 - 3) Seksi Fasilitasi Dana Sosial dan Undian Sosial; 1 orang.
- f. UPT; 17 orang
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Visi dan Misi

Dinas Sosial Kota Tangerang memiliki visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial Yang Mandiri Dan Berakhlakul Karimah"

Dengan upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Kota Tangerang mempunyai yang relevan dengan isu aktual yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Memberdayakan potensi dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. kelembagaan kesejahteraan sosial.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang social sesuai dengan visi dan misi Walikota

sebagaimana terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
- b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja, dan anggaran tahunan Dinas
- c. Pengkoordinasian dan pengadiln seluruh kegiatan operasional Dinas
- d. Perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas fungsi
- e. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dibidang social
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai dilingkungan Dinas Sosial
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan serta penggunaan anggaran tahunan Dinas

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekertaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang admnistrasi umum, keegawaian, keuangan dan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
- b. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sekretariat
- c. Penyelenggaran penyusunan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas
- d. Penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan admnistrasi keuangan
- e. Pengawasan pembinaan terhadap kepala Sub Bagian yang di bawahkannya
- f. Evaluasi dan Pelaporan

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	87	33
2	Perempuan	176	67
Jumlah		263	100

Sumber: Diolah dari data primer 2016

Data pada Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 263 orang yang merupakan responden terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan sebesar 176 orang sedangkan laki-laki sebanyak 87 orang. Dari data tersebut di atas

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden yang menjadi objek penelitian ini menurut umur ditunjukkan pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	21 s.d. 30 tahun	11	4
2	31 s.d. 40 tahun	92	35
3	41 s.d. 50 tahun	112	43
4	51 s.d. 60 tahun	48	18
Jumlah		263	100

Sumber: Diolah dari data primer 2016

Tabel 4.4 menunjukkan kebanyakan umur responden berada pada kisaran umur 41 s/d 50 tahun sebesar 43% sedangkan yang terkecil berada pada umur 21 s/d 30 tahun yaitu sebesar 4%. Tingkat usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah usia dewasa.

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut pendidikan ditunjukkan pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	95	36
2	SMP/Sederajat	132	50
3	SMA/Sederajat	36	14
4	D1/D2/D3	0	0
5	S1	0	0
Jumlah		263	100

Sumber: Diolah dari data primer 2016

Tingkat pendidikan responden yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMP/Sederajat sebanyak 132 orang (50%), SD/Sederajat sebanyak 95 orang (36%), SMA/Sederajat sebanyak 36 orang (14%), D1/D2/D3, serta S1 tidak ada. Jika dilihat dari tabel di atas sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan yang cukup rendah dan nampak bahwa responden didominasi oleh lulusan SMP/Sederajat.

4.2.4. Hasil Penelitian

Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terstruktur dan penyebaran kuesioner. Kuesioner ini disebarkan kepada 263 orang yang mendapatkan program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mengetahui lebih dalam dari jawaban kuesioner yang dikemukakan responden-responden tersebut. Adapun wawancara terstruktur dan penyebaran kuesioner ini dilakukan dalam rangka mengetahui penilaian responden mengenai Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang .

Dalam melakukan analisa data, peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn yang didalamnya terdapat enam sub variabel. Skala yang dipakai dalam kuesioner adalah skala Likert, pilihan jawaban dalam kuesioner terdiri dari 4 item yang memiliki pilihan berbeda tetapi poinnya sama antara pernyataan 1 (satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima), yaitu pilihan SS (Sangat Setuju) bernilai 5, pilihan S (Setuju) bernilai 4, pilihan A (Abstain) bernilai 3, pilihan TS

(Tidak Setuju) bernilai 2, dan pilihan STS (Sangat Tidak Setuju) bernilai 1. Maka semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner berarti semakin baik Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Di bawah ini merupakan pemaparan jawaban responden atas kuesioner yang akan digambarkan dalam bentuk tabel, disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan melalui kuesioner kepada responden sebanyak 263 orang berdasarkan indikator dalam teori yang digunakan. Adapun pemaparan jawaban atas setiap item pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.4.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tabel 4.6.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan dengan baik

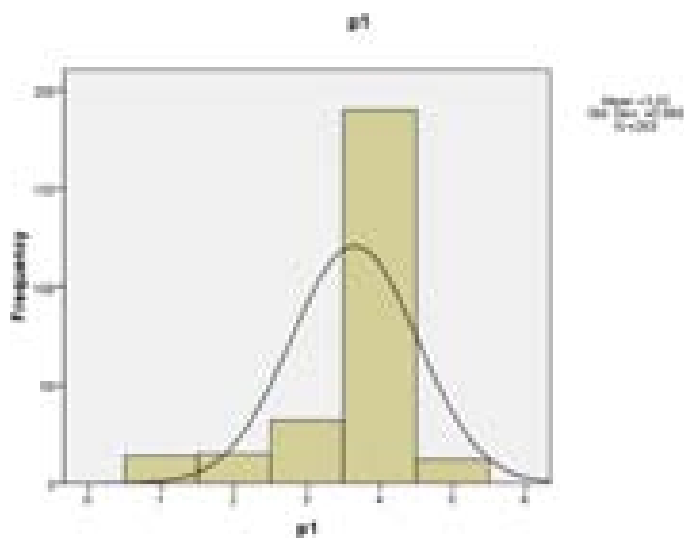
p1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	14	5,3	5,3	5,3
Tidak Setuju	15	5,7	5,7	11,0
Abstain	32	12,2	12,2	23,2
Setuju	190	72,2	72,2	95,4
Sangat Setuju	12	4,6	4,6	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.6, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 12 orang (4,6%), yang menjawab setuju 190 orang (72,2%), yang menjawab abstain sebanyak 32 orang (12,2%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 15 orang (5,7%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 14 orang (5,3%) tentang kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan

Program Raskin sudah berjalan dengan baik. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3.
Diagram Tentang kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan dengan baik



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (72,2%) yang artinya bahwa selama ini kebijakan pemerintah terkait dengan program raskin khususnya di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik kendatipun sebagian kecil ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala teknis di lapangan baik penyaluran ataupun pendistribusiannya.

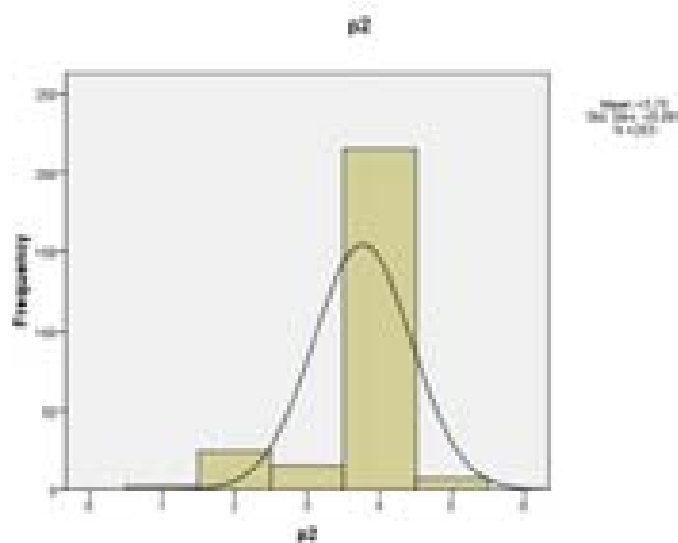
Tabel 4.7.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan

p2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	,8	,8	,8
Tidak Setuju	24	9,1	9,1	9,9
Abstain	15	5,7	5,7	15,6
Setuju	215	81,7	81,7	97,3
Sangat Setuju	7	2,7	2,7	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Mencermati data pada tabel 4.7, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 7 orang (2,7%), yang menjawab setuju 215 orang (81,7%), yang menjawab abstain sebanyak 15 orang (5,7%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 24 orang (9,1%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (0,8%) tentang kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini :

Gambar 4.4.
Diagram tentang kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan



Hasil pengamatan di lapangan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (81,7%) yang artinya bahwa selama ini kebijakan program Raskin dari pemerintah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, karena masyarakat merasa terbantu

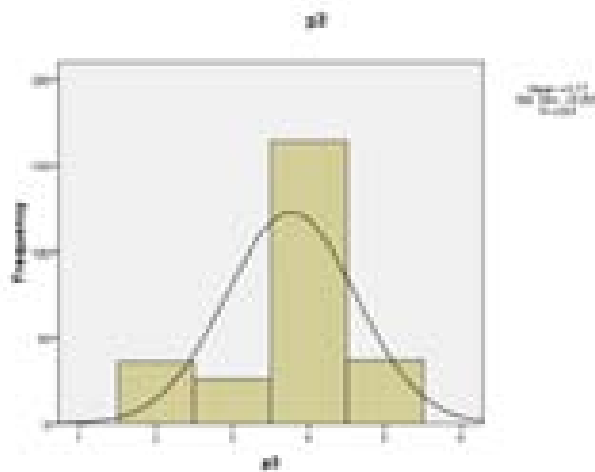
Tabel 4.8.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pencapaian hasil dari program raskin berjalan maksimal

p3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	36	13,7	13,7	13,7
Abstain	26	9,9	9,9	23,6
Setuju	164	62,4	62,4	85,9
Sangat Setuju	37	14,1	14,1	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.8, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 orang (14,1%), yang menjawab setuju 164 orang (62,4%), yang menjawab abstain sebanyak 26 orang (9,9%) dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 36 orang (13,7%) tentang pencapaian hasil dari program raskin berjalan maksimal. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini :

Gambar 4.5
Diagram tentang pencapaian hasil dari program raskin berjalan maksimal



Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa pencapaian hasil dari program raskin selama ini berjalan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (62,4%) yang artinya bahwa dengan adanya program Raskin khususnya bagi RTS-PM di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang masyarakat dapat merasakan manfaat dengan digulirkannya Program Raskin oleh Pemerintah Pusat, sekaligus tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin agar terbantu dari sisi ekonomi.

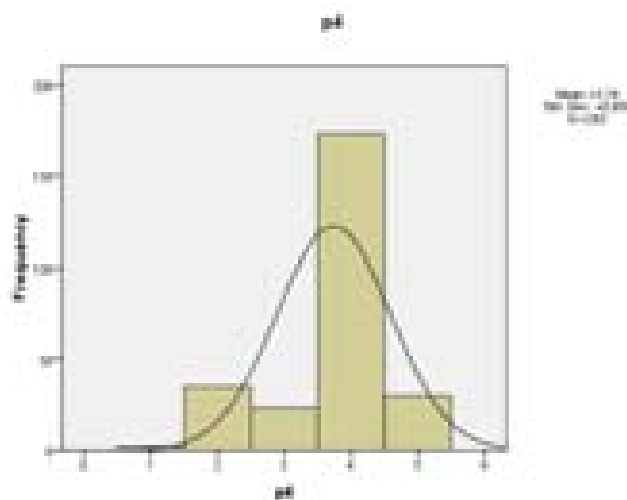
Tabel 4.9.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui tentang kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah

p4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	,8	,8	,8
Tidak Setuju	35	13,3	13,3	14,1
Abstain	23	8,7	8,7	22,8
Setuju	173	65,8	65,8	88,6
Sangat Setuju	30	11,4	11,4	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.9, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 30 orang (11,4%), yang menjawab setuju 173 orang (65,8%), yang menjawab abstain sebanyak 23 orang (8,7%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 35 orang (13,3%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (0,8%) tentang masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui tentang kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6
Diagram tentang masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bahwa masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui tentang kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (65,8%) artinya bahwa selama ini mengetahui atas kebijakan pemerintah dalam penyaluran raskin, yaitu raskin adalah salah satu Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapatkan beras murah untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

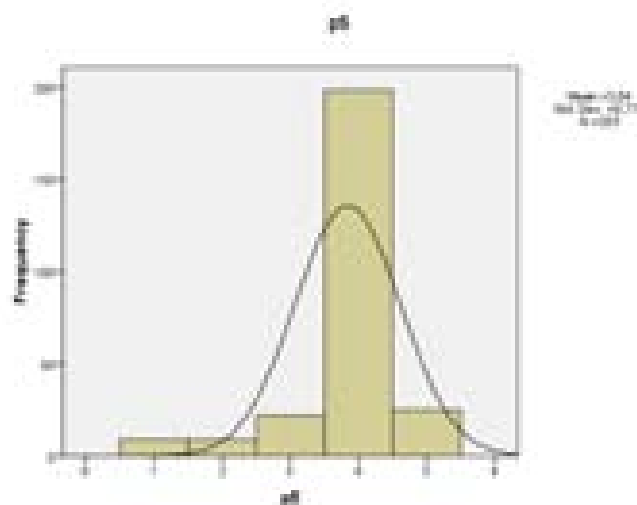
Tabel 4.10.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah

p5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	9	3,4	3,4	3,4
Tidak Setuju	9	3,4	3,4	6,8
Abstain	22	8,4	8,4	15,2
Setuju	198	75,3	75,3	90,5
Sangat Setuju	25	9,5	9,5	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.10, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 25 orang (9,5%), yang menjawab setuju 198 orang (75,3%), yang menjawab abstain sebanyak 22 orang (8,7%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 orang (3,4%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (3,4%) tentang masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini :

Gambar 4.7
Diagram tentang masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah



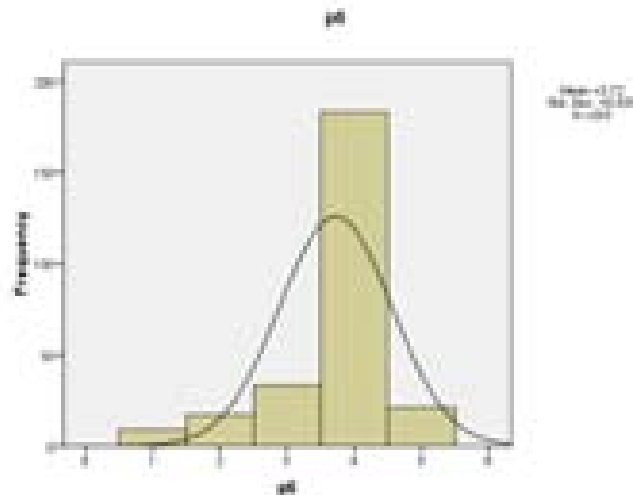
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (75,3%) artinya bahwa selama ini masyarakat mengetahui tata cara atas program Raskin yang disalurkan, seperti contoh dalam pelaksanaannya di lapangan, secara teknis RTS-PM mengetahui biasanya mendapat jatah 15 kg. Akan tetapi bilamana terjadi atau dikarenakan jumlah RTS-PM lebih banyak dari kuota ada kebijakan lain berdasarkan musyawarah di Kelurahan/Desa RTS-PM hanya mendapat 13 kg, itupun bertujuan untuk kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya di wilayah Kelurahan Karang Anyar bukan untuk kepentingan camat.

Tabel 4.11.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima
 p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	3,4	3,4	3,4
	Tidak Setuju	17	6,5	6,5	9,9
	Abstain	33	12,5	12,5	22,4
	Setuju	183	69,6	69,6	92,0
	Sangat Setuju	21	8,0	8,0	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.11, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang (8,0%), yang menjawab setuju 183 orang (69,6%), yang menjawab abstain sebanyak 33 orang (12,5%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang (6,5%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (3,4%) tentang masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini :

Gambar 4.8
Diagram tentang masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima



Berdasarkan hasil pengamatan bahwa masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (69,6%) yang artinya bahwa dengan digulirkannya program Raskin, masyarakat menyambut baik karena kesejahteraan warga miskin dapat meningkat. Selain itu dalam hal Pendistribusian Raskin di Kecamatan Neglasari sudah bagus.

4.2.4.2. Sumber Daya

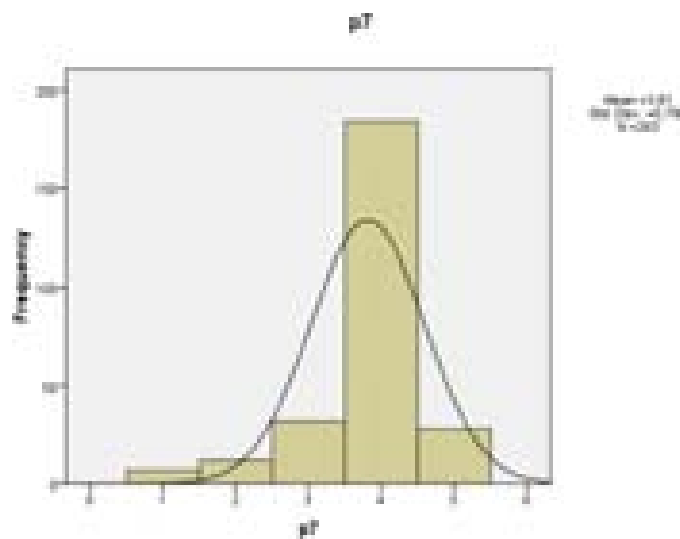
Tabel 4.12.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	7	2,7	2,7	2,7
	Tidak Setuju	12	4,6	4,6	7,2
	Abstain	32	12,2	12,2	19,4
	Setuju	184	70,0	70,0	89,4
	Sangat Setuju	28	10,6	10,6	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.12, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 orang (10,6%), yang menjawab setuju 184 orang (70,0%), yang menjawab abstain sebanyak 32 orang (12,2%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 12 orang (4,6%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 orang (2,7%) tentang proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut ini :

Gambar 4.9
Diagram tentang proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (69,6%) yang artinya bahwa kompleksitas yang harus dihadapi oleh para pelaksana di lapangan dalam

menjalankan implementasi kebijakan raskin memang menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan upaya untuk dapat melakukan interpretasi secara tepat atas tujuan-tujuan kebijakan yang harus diimplementasikan, akan tetapi juga berkaitan proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat. Oleh karena itu, seluruh unsur pelaksana harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap program pemerintahan/Raskin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini, agar hasilnya tepat sasaran.

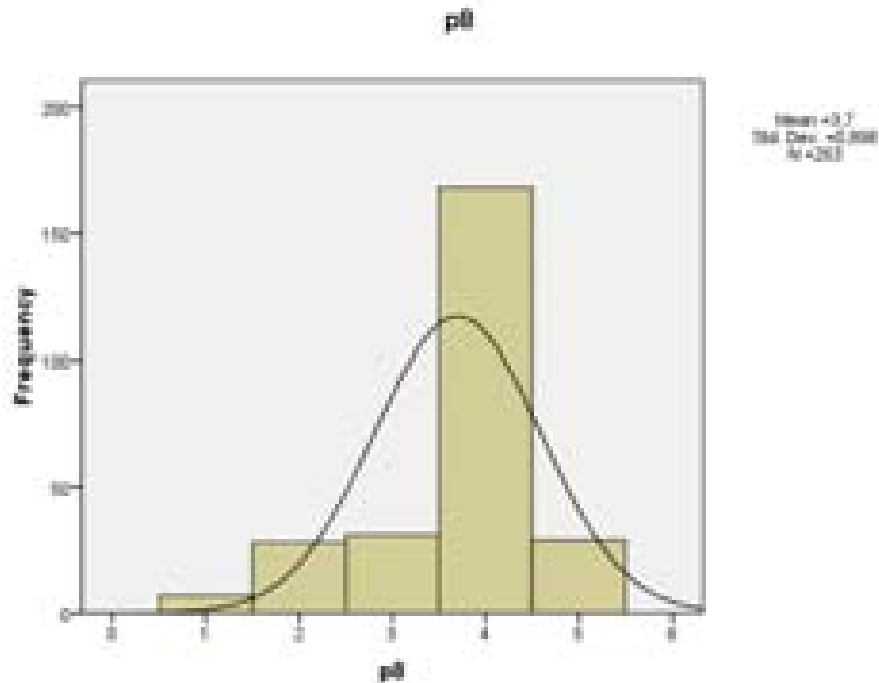
Tabel 4.13.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah anda

p8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	7	2,7	2,7	2,7
Tidak Setuju	28	10,6	10,6	13,3
Abstain	31	11,8	11,8	25,1
Setuju	168	63,9	63,9	89,0
Sangat Setuju	29	11,0	11,0	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Mencermati data pada tabel 4.13, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 29 orang (11,0%), yang menjawab setuju 168 orang (63,9%), yang menjawab abstain sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 28 orang (10,6%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 orang (2,7%) tentang dalam pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini :

Gambar 4.10
Diagram tentang pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah anda



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (63,9%) yang artinya bahwa implementasi atas program Raskin ini bertujuan agar derajat perubahan yang ingin dicapai oleh masyarakat khususnya di daerah Karang Anyar Kecamatan Neglasari masyarakat dapat lebih sejahtera, dan mereka tidak susah lagi membeli beras. Oleh karena itu, antusias masyarakat terhadap Raskin ini sangat tinggi, sampai mereka berebutan untuk membeli Raskin kepada RT.

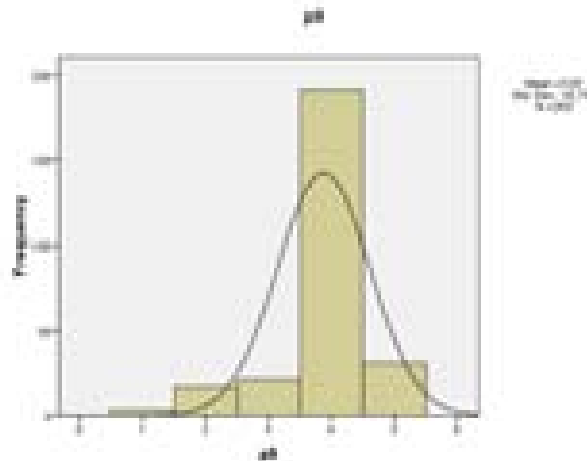
Tabel 4.14.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa RTS penerima manfaat Raskin tidak dipungut biaya/harga dalam proses pelayanannya

p9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	1,1	1,1	1,1
Tidak Setuju	17	6,5	6,5	7,6
Abstain	21	8,0	8,0	15,6
Setuju	191	72,6	72,6	88,2
Sangat Setuju	31	11,8	11,8	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.14, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab setuju 191 orang (72,6%), yang menjawab abstain sebanyak 21 orang (8,0%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang (6,5%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (1,1%) tentang Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin tidak dipungut biaya/harga yang tidak sesuai dalam proses pelayanannya. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini :

Gambar 4.11
Diagram tentang pernyataan bahwa RTS penerima manfaat Raskin tidak dipungut biaya/harga dalam proses pelayanannya



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin tidak dipungut biaya/harga yang tidak sesuai dalam proses pelayanannya. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (72,6%) yang artinya bahwa implementasi atas program Raskin ini, harga beras yang dibebankan kepada Rumah Tangga Miskin itu tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 1.600. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis Keputusan Walikota Tangerang. Akan tetapi ada alasan pula yang berpendapat bahwa jika tim program Raskin baik di tingkat Kecamatan maupun sampai tingkat RT, jarak untuk pendistribusian jauh, maka penetapan harga beras disesuaikan karena memerlukan biaya operasional tambahan.

Tabel 4.15.

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin yang disalurkan di daerah anda sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin

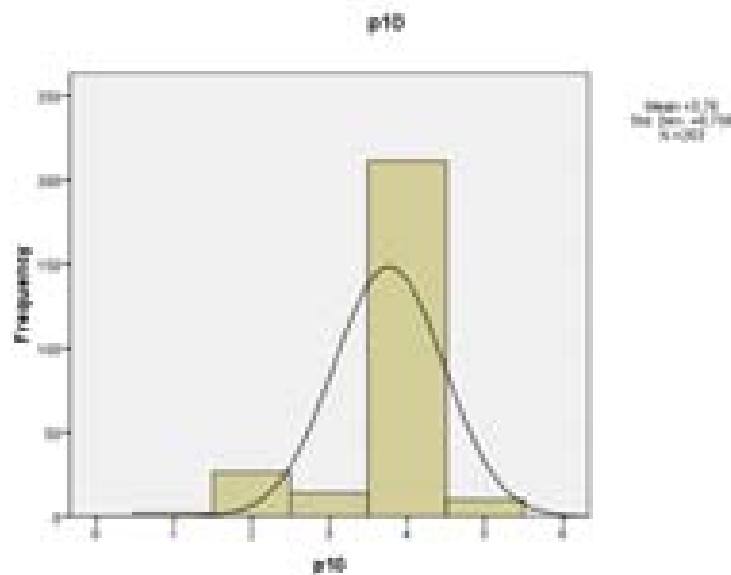
p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	,8	,8	,8
	Tidak Setuju	26	9,9	9,9	10,6
	Abstain	14	5,3	5,3	16,0
	Setuju	211	80,2	80,2	96,2
	Sangat Setuju	10	3,8	3,8	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.15, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang (3,8%), yang menjawab setuju 211 orang (80,2%), yang menjawab abstain sebanyak 14 orang (5,3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 26 orang (9,9%) dan yang menjawab sangat tidak

setuju sebanyak 2 orang (9,9%) tentang program Raskin yang disalurkan di daerah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini :

Gambar 4.12
Diagram tentang program Raskin yang disalurkan di daerah anda sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin



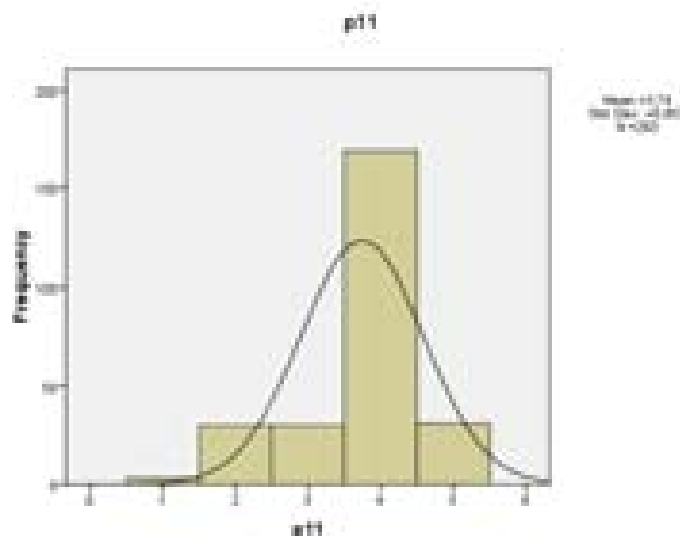
Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa program Raskin yang disalurkan di daerah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (80,2%) yang artinya bahwa penyaluran beras Raskin khususnya di daerah Karang Anyar Kecamatan Neglasari sudah mencukupi kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari salah satu responden, yaitu Ketua RT. 02/01 sangat berterima kasih karena, masyarakat merasa terbantu dan mengurangi beban mereka meskipun mendapat jatah jatah beras Raskin yang disalurkan hanya 1 bulan sekali, akan tetapi hal itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.16.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah memberikan
jangka waktu terhadap berlakunya program Raskin
p11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	1,1	1,1	1,1
Tidak Setuju	30	11,4	11,4	12,5
Abstain	30	11,4	11,4	24,0
Setuju	169	64,3	64,3	88,2
Sangat Setuju	31	11,8	11,8	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.16, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab setuju 169 orang (64,3%), yang menjawab abstain sebanyak 30 orang (11,4%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 30 orang (11,4%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (1,1%) tentang program Raskin yang disalurkan di daerah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini :

Gambar 4.13
Diagram tentang pemerintah memberikan jangka waktu terhadap
berlakunya program Raskin



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa program Raskin yang disalurkan di daerah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (80,2%) yang artinya bahwa penyaluran beras Raskin khususnya di daerah Karang Anyar Kecamatan Neglasari sudah mencukupi kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari salah satu responden, yaitu : “Ketua RT. 02/01 sangat berterima kasih karena, masyarakat merasa terbantu dan mengurangi beban mereka meskipun mendapat jatah jatah beras Raskin yang disalurkan hanya 1 bulan sekali, akan tetapi hal itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat”.

Tabel 4.17.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa proses penyaluran distribusi Raskin dinilai tepat waktu

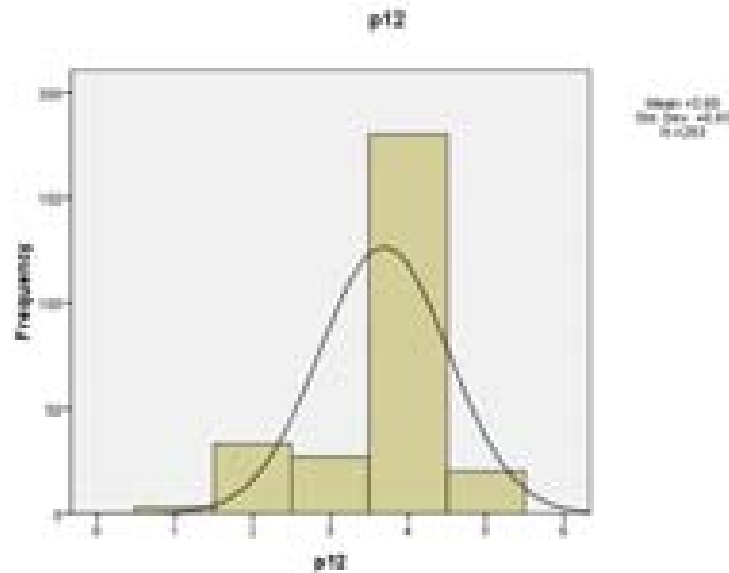
p12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	1,1	1,1	1,1
Tidak Setuju	33	12,5	12,5	13,7
Abstain	27	10,3	10,3	24,0
Setuju	180	68,4	68,4	92,4
Sangat Setuju	20	7,6	7,6	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.17, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (7,6%), yang menjawab setuju 180 orang (68,4%), yang menjawab abstain sebanyak 27 orang (10,3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 33 orang (12,5%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (1,1%) tentang proses penyaluran

distribusi beras Raskin dinilai tepat waktu. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini :

Gambar 4.14
Diagram tentang proses penyaluran distribusi Raskin dinilai tepat waktu



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya proses penyaluran distribusi beras Raskin dinilai tepat waktu. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (68,4%) yang artinya bahwa pendistribusian raskin sesuai dengan harapan masyarakat, karena para pelaksana kebijakan di lapangan bekerja maksimal, sehingga hasilnya raskin terdistribusi dan disalurkan secara tepat waktu kepada Rumah Tangga Miskin.

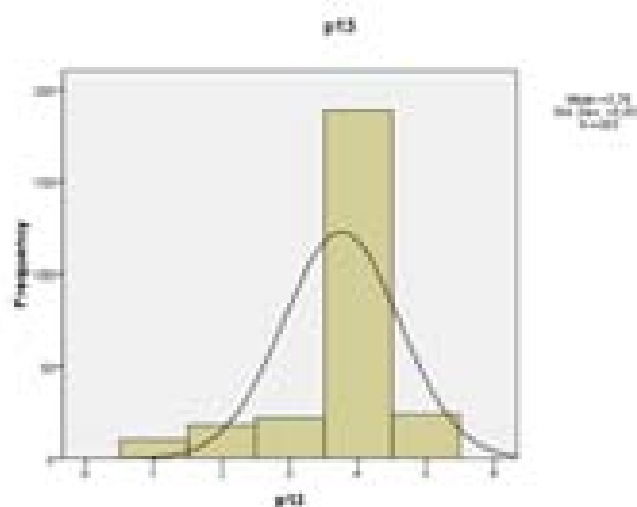
Tabel 4.18.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam memberikan pelayanan, pihak/tim pelaksana Raskin sudah bekerja sangat cepat

p13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	10	3,8	3,8	3,8
Tidak Setuju	18	6,8	6,8	10,6
Abstain	22	8,4	8,4	19,0
Setuju	189	71,9	71,9	90,9
Sangat Setuju	24	9,1	9,1	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.18, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang (9,1%), yang menjawab setuju 189 orang (71,9%), yang menjawab abstain sebanyak 22 orang (8,4%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 orang (6,8%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (3,8%) tentang dalam memberikan pelayanan, pihak/tim pelaksana Raskin sudah bekerja sangat cepat. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini :

Gambar 4.15
Diagram tentang dalam memberikan pelayanan, pihak/tim pelaksana Raskin sudah bekerja sangat cepat



Berdasarkan pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya pihak/tim pelaksana Raskin dalam memberikan pelayanan sudah bekerja sangat cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (71,9%) yang artinya bahwa para pihak tim pelaksana raskin untuk dapat bekerja dengan cepat agar, beras raskin ini dapat tersalurkan tanpa menunggu waktu lama, seperti ditegaskan oleh salah satu responden, yaitu Ketua RT. 01/02 yang menyatakan bahwa : “RTM mempunyai keinginan yang sama dengan RTM lainnya yang mengharapkan Raskin tersebut pendistribusiannya lancar secepat-cepatnya minimal 1 minggu sekali Raskin tersebut bias didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu”.

Tabel 4.19.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa proses pendistribusi Raskin sudah sesuai dan teratur

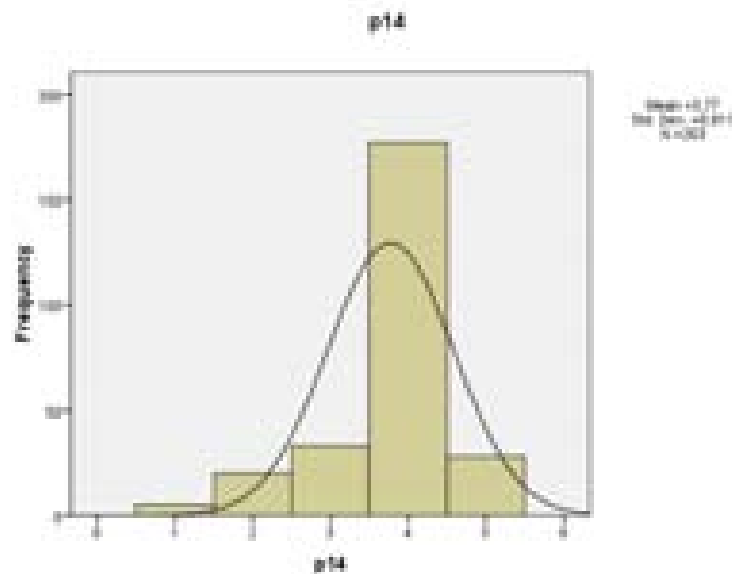
p14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	5	1,9	1,9	1,9
Tidak Setuju	20	7,6	7,6	9,5
Abstain	33	12,5	12,5	22,1
Setuju	177	67,3	67,3	89,4
Sangat Setuju	28	10,6	10,6	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Mencermati data pada tabel 4.19, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 orang (10,6%), yang menjawab setuju 177 orang (67,3%), yang menjawab abstain sebanyak 33 orang (12,5%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 20 orang (7,6%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (1,9%) tentang proses pendistribusi Raskin sudah

sesuai dan teratur di dalam pelaksanaannya. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini :

Gambar 4.16
Diagram tentang proses pendistribusi Raskin sudah sesuai dan teratur



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya proses pendistribusi Raskin teratur walaupun adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (67,3%) yang artinya bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan raskin ini, seperti dalam perencanaan pendistribusian terkadang tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan lama dalam pendistribusian dari pihak bulog sehingga pendistribusian program beras Raskin baru sampai ke RTM pada bulan ke 3 (tiga).

4.2.4.3. Karakter Agen Pelaksana

Tabel 4.20.

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa prosedur program Raskin yang diberikan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah

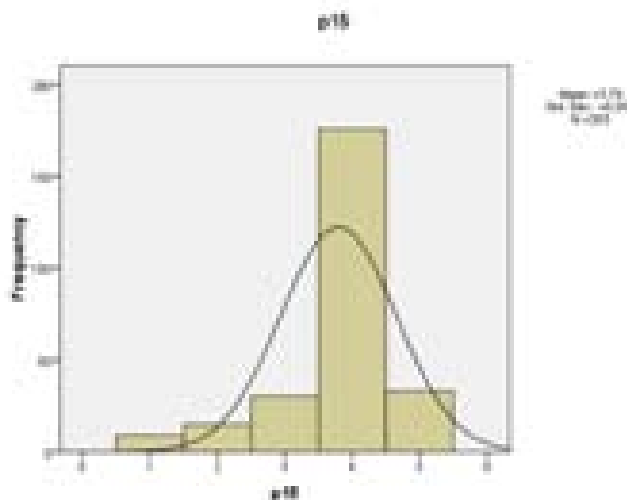
p15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	9	3,4	3,4	3,4
Tidak Setuju	15	5,7	5,7	9,1
Abstain	30	11,4	11,4	20,5
Setuju	176	66,9	66,9	87,5
Sangat Setuju	33	12,5	12,5	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.20, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang (12,5%), yang menjawab setuju 176 orang (66,9%), yang menjawab abstain sebanyak 30 orang (11,4%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 15 orang (5,7%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (3,4%) tentang prosedur program Raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini :

Gambar 4.17

Diagram tentang prosedur program Raskin yang diberikan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya prosedur program Raskin yang diberikan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (66,9%) artinya bahwa secara nyata program raskin ini mengacu pada isu strategis pengentasan kemiskinan melalui visi dan misi Kota Tangerang, agar kesejahteraan warga miskin dapat terangkat, sehingga implementasi Program Raskin dalam prakteknya sesuai dengan kebijakan Pemerintah, sebagai contoh Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok (beras bersubsidi) harga tebus beras Rp. 1.600,- per kilogram netto.

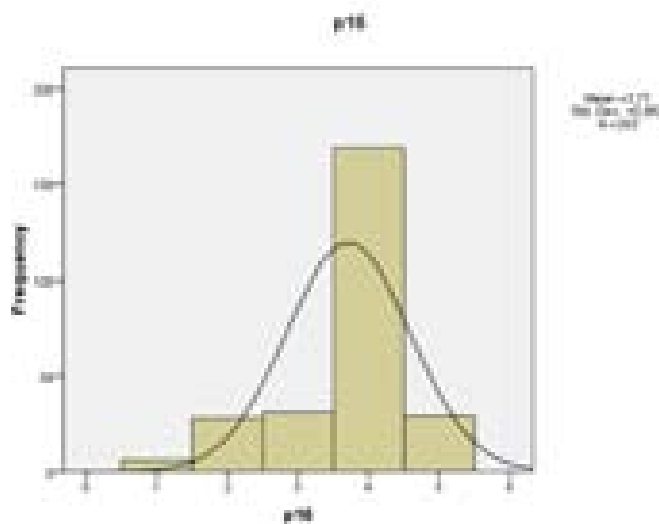
Tabel 4.21.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa adanya dukungan dari Pemerintah daerah mengenai program Raskin

p16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	6	2,3	2,3	2,3
Tidak Setuju	28	10,6	10,6	12,9
Abstain	31	11,8	11,8	24,7
Setuju	169	64,3	64,3	89,0
Sangat Setuju	29	11,0	11,0	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.21, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 29 orang (11,0%), yang menjawab setuju 169 orang (64,3%), yang menjawab abstain sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 28 orang (10,6%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (2,3%) tentang adanya dukungan dari Pemerintah daerah mengenai program Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut ini :

Gambar 4.18
Diagram tentang adanya dukungan dari Pemerintah daerah mengenai program Raskin



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya program raskin yang terselenggara adanya dukungan dari pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (64,3%) mengingat program Raskin adalah salah satu Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapatkan beras murah untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

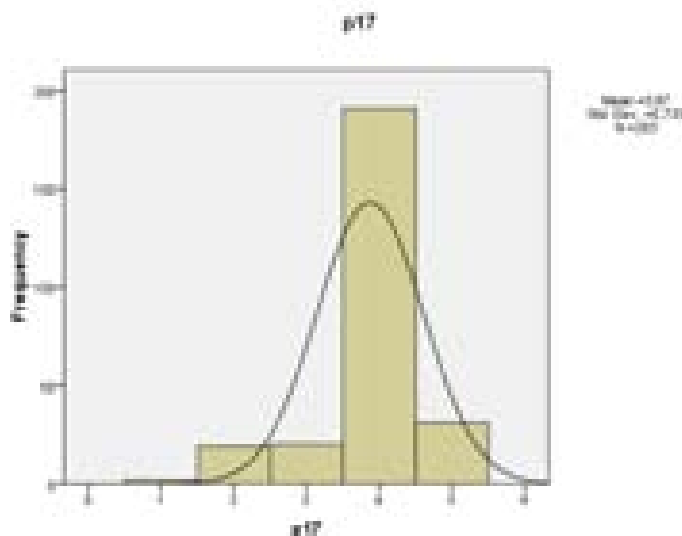
Tabel 4.22.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa volume beras yang didistribusikan memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM

p17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	,8	,8	,8
Tidak Setuju	19	7,2	7,2	8,0
Abstain	20	7,6	7,6	15,6
Setuju	191	72,6	72,6	88,2
Sangat Setuju	31	11,8	11,8	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.22, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab setuju 191 orang (72,6%), yang menjawab abstain sebanyak 20 orang (7,6%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 19 orang (7,2%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 8 orang (0,8%) tentang volume beras yang didistribusikan pemerintah memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut ini :

Gambar 4.19
Diagram tentang volume beras yang didistribusikan memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya volume beras yang didistribusikan pemerintah kepada masyarakat memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM yang terdata. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (72,6%) yang artinya bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan secara

akurat dengan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana, sehingga dapat merumuskan suatu rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat kebutuhan volume beras yang didistribusikan kepada masyarakat sehingga memenuhi tingkat kecukupan dengan jumlah RTS-PM yang ada.

Tabel 4.23.

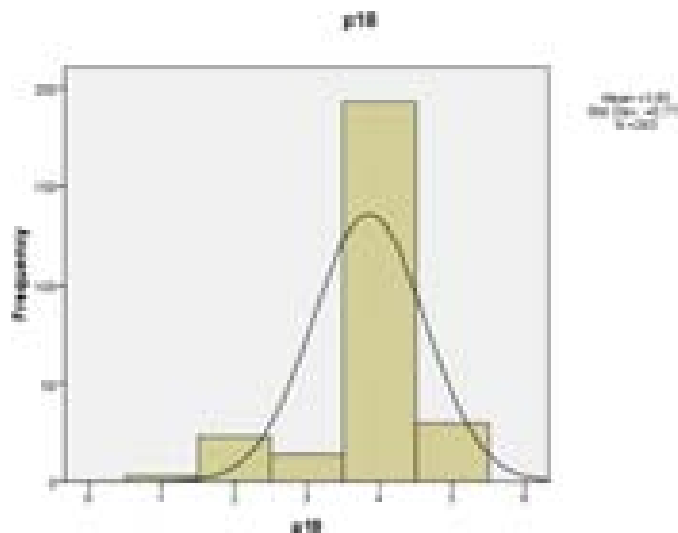
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraan program Raskin

p18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	1,1	1,1	1,1
Tidak Setuju	23	8,7	8,7	9,9
Abstain	14	5,3	5,3	15,2
Setuju	193	73,4	73,4	88,6
Sangat Setuju	30	11,4	11,4	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.23, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 30 orang (11,4%), yang menjawab setuju 193 orang (73,4%), yang menjawab abstain sebanyak 14 orang (5,3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 23 orang (8,7%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (1,1%) tentang pemerintah memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraan program Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.20 berikut ini :

Gambar 4.20
Diagram tentang pemerintah memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan
terkait dengan penyelenggaraan program Raskin



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan sanksi kepada para pelaksana jika ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraan program Raskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (73,4%) yang artinya bahwa tingkat kepatuhan dan respon aparat pelaksana khususnya di Kelurahan Karang Anyar untuk tetap terus diperhatikan dan selalu konsisten, mengingat hal ini sebagai faktor pendukung dan penghambat program Raskin dan jika implementasi program raskin di kelurahan Karang Anyar tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, maka sudah dipastikan program Raskin tersebut tidak berhasil. Untuk itu pemerintah perlu memberikan sanksi bilamana ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraannya.

Tabel 4.24.

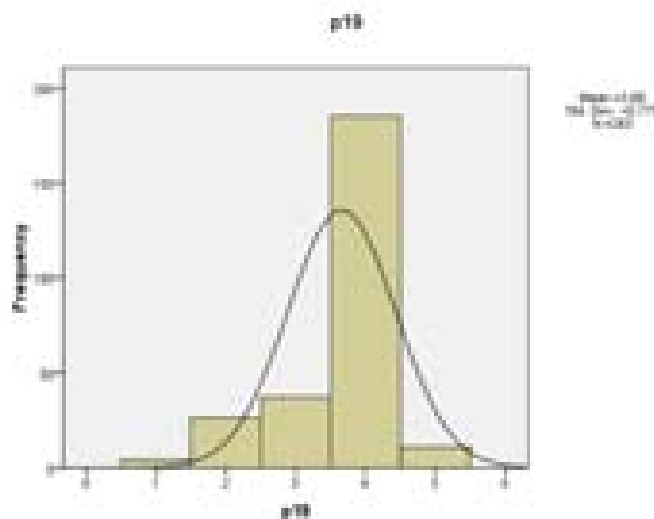
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil
p19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	1,5	1,5	1,5
	Tidak Setuju	26	9,9	9,9	11,4
	Abstain	37	14,1	14,1	25,5
	Setuju	185	70,3	70,3	95,8
	Sangat Setuju	11	4,2	4,2	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.24, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 orang (4,2%), yang menjawab setuju 185 orang (70,3%), yang menjawab abstain sebanyak 37 orang (14,1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 26 orang (9,9%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (1,5%) tentang dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 4.21 :

Gambar 4.21

Diagram tentang dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (70,3%) yang artinya bahwa pendataan dan penyaluran raskin tepat sasaran. Hal ini dipertegas oleh salah satu keterangan responden yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaannya kami memberikan tugas kepada staf yang dipercaya, yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk memegang peranan penting di lapangan, baik untuk berdialog dengan RT/RW tentang permasalahan-permasalahan Raskin yang ditemukan di lapangan”, sehingga dalam prakteknya penyaluran raskin dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

4.2.4.4. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana

Tabel 4.25.

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam Program Raskin.

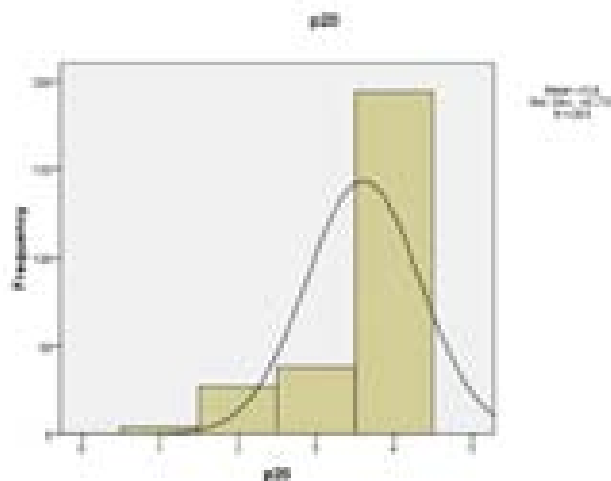
p20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	4	1,5	1,5	1,5
Tidak Setuju	27	10,3	10,3	11,8
Abstain	38	14,4	14,4	26,2
Setuju	194	73,8	73,8	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.25, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju 194 orang (73,8%), yang menjawab abstain sebanyak 38 orang (14,4%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 27 orang (10,3%) dan yang

menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (1,5%) tentang masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam Program Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.22 berikut ini :

Gambar 4.22
Diagram tentang dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil



Dari hasil pengamatan diketahui bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam Program Raskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (73,8%) yang artinya bahwa pendataan dan penyaluran raskin tepat sasaran. Hal ini dipertegas oleh salah satu keterangan responden yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaannya kami memberikan tugas kepada staf yang dipercaya, yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk memegang peranan penting di lapangan, baik untuk berdialog dengan RT/RW tentang permasalahan-permasalahan Raskin yang ditemukan di lapangan”, sehingga dalam prakteknya penyaluran raskin dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

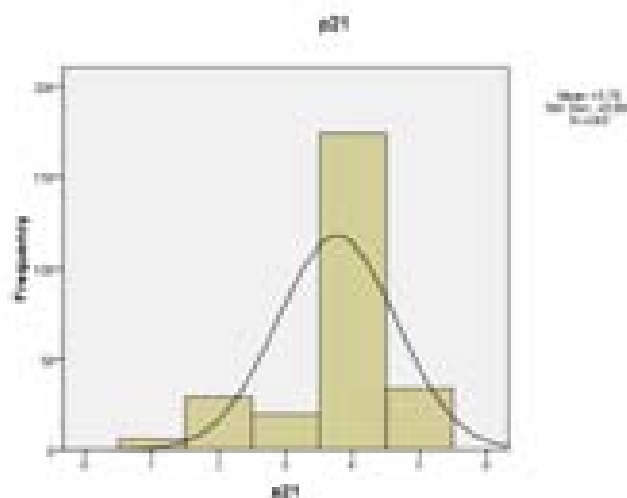
Tabel 4.26.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dalam program Raskin ini masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab

p21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	6	2,3	2,3	2,3
Tidak Setuju	29	11,0	11,0	13,3
Abstain	20	7,6	7,6	20,9
Setuju	174	66,2	66,2	87,1
Sangat Setuju	34	12,9	12,9	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.26, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 34 orang (12,9%), menjawab setuju sebanyak 174 orang (66,2%), menjawab abstain sebanyak 20 orang (7,6%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 29 orang (11,0%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (2,3%) tentang dalam program Raskin ini masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.23 berikut ini :

Gambar 4.23
Diagram tentang dalam program Raskin ini masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab



Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (66,2%) yang artinya bahwa pelaksana distribusi Raskin khususnya di tingkat Kelurahan Karang Anyar pelaksana kebijakan bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya program raskin di wilayahnya sesuai dengan prosedur pelaksanaan pendistribusian Raskin yang diatur dalam petunjuk teknis.

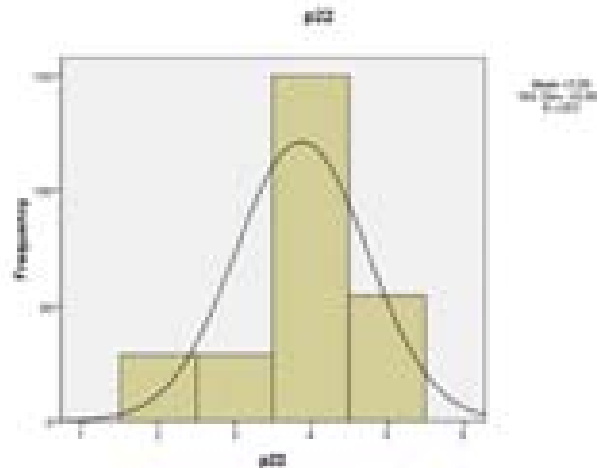
Tabel 4.27.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini

p22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	29	11,0	11,0	11,0
Abstain	29	11,0	11,0	22,1
Setuju	150	57,0	57,0	79,1
Sangat Setuju	55	20,9	20,9	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.7, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 55 orang (20,9%), menjawab setuju 150 orang (57,0%), yang menjawab abstain sebanyak 29 orang (11,0%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 29 orang (11,0%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (2,3%) tentang petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.24 berikut ini :

Gambar 4.24
Diagram tentang petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (57,0%) yang artinya bahwa kemudahan ini yaitu terkait dengan Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menerima.

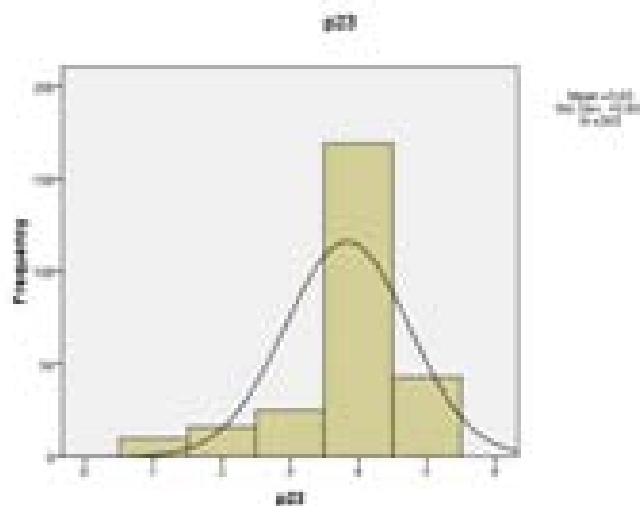
Tabel 4.28.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa para tim pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima jatah Raskin

p23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	3,8	3,8	3,8
	Tidak Setuju	16	6,1	6,1	9,9
	Abstain	25	9,5	9,5	19,4
	Setuju	169	64,3	64,3	83,7
	Sangat Setuju	43	16,3	16,3	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.28, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 43 orang (16,3%), menjawab setuju 169 orang (64,3%), yang menjawab abstain sebanyak 25 orang (9,5%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 16 orang (6,1%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (3,8%) tentang para tim pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima jatah Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut ini :

Gambar 4.25
Diagram tentang para tim pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima jatah Raskin



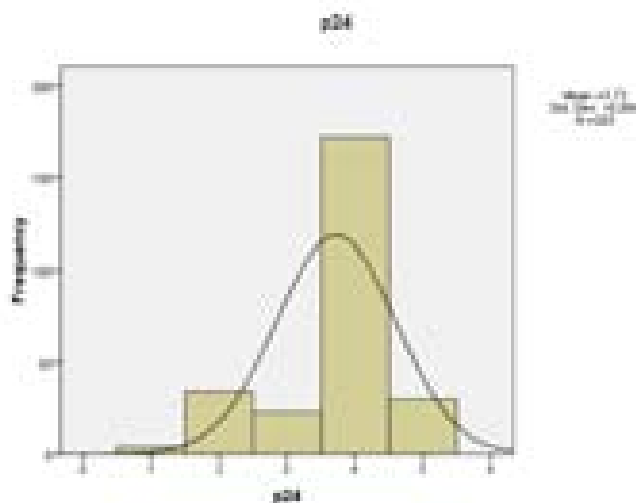
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (64,3%) yang artinya bahwa raskin diberikan kepada RTS-PM dengan mudah, akan tetapi dengan catatan warga mengambil Raskin setelah memiliki uang, dan tidak ada sistim menunggak.

Tabel 4.29.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa selain itu para tim dan pelaksana lainnya memberikan pelayanan dengan ramah
p24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	1,5	1,5	1,5
	Tidak Setuju	34	12,9	12,9	14,4
	Abstain	23	8,7	8,7	23,2
	Setuju	172	65,4	65,4	88,6
	Sangat Setuju	30	11,4	11,4	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.29, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 30 orang (11,4%), menjawab setuju 172 orang (65,4%), yang menjawab abstain sebanyak 23 orang (8,7%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 34 orang (12,9%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (1,5%) tentang para tim dan pelaksana lainnya memberikan pelayanan dengan ramah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut ini :

Gambar 4.26
Diagram tentang selain itu para tim dan pelaksana lainnya memberikan pelayanan dengan ramah



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya petugas pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan ramah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (65,4%) yang artinya bahwa warga masyarakat penerima raskin mengharapkan adanya sikap yang ramah, sehingga dalam implementasi dari program raskin ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakatnya.

4.2.4.5. Komunikasi Antar Organisasi

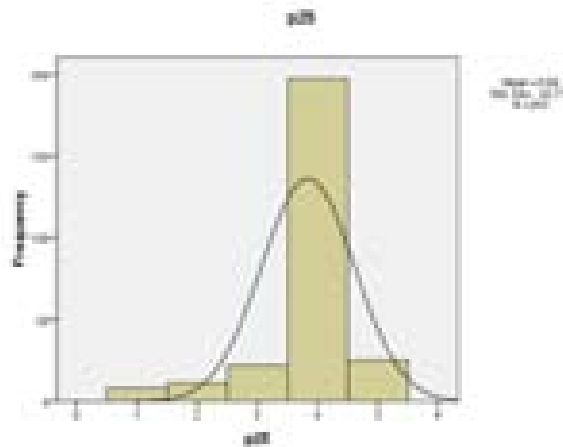
Tabel 4.30.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin

p25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	8	3,0	3,0	3,0
Tidak Setuju	11	4,2	4,2	7,2
Abstain	22	8,4	8,4	15,6
Setuju	197	74,9	74,9	90,5
Sangat Setuju	25	9,5	9,5	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.30, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 25 orang (9,5%), menjawab sangat 197 orang (74,9%), yang menjawab abstain sebanyak 22 orang (8,4%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang (4,2%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 8 orang (3,0%) tentang petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut ini :

Gambar 4.27
Diagram tentang petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa dalam pelaksanaannya petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (74,9%) yang artinya bahwa program raskin dalam pelaksanaan baik melalui Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RS-PM Raskin dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

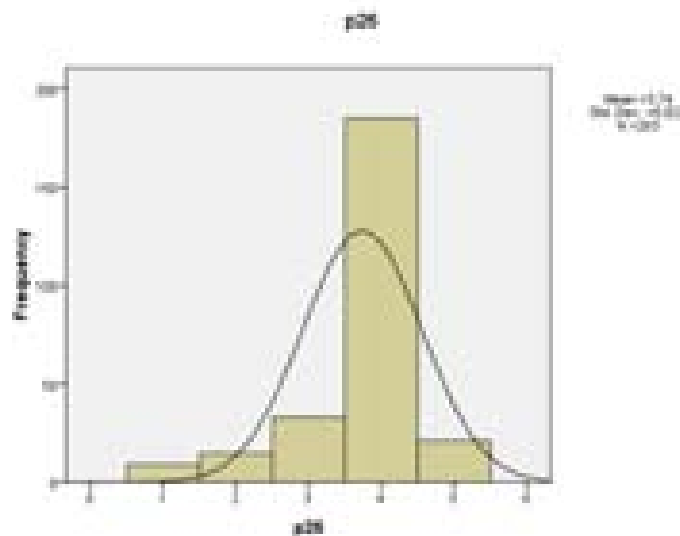
Tabel 4.31.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin

p26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	3,4	3,4	3,4
	Tidak Setuju	15	5,7	5,7	9,1
	Abstain	33	12,5	12,5	21,7
	Setuju	185	70,3	70,3	92,0
	Sangat Setuju	21	8,0	8,0	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.31, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 21 orang (8,0%), menjawab sangat 185 orang (70,3%), yang menjawab abstain sebanyak 33 orang (12,5%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 15 orang (5,7%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (3,4%) tentang petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.28 berikut ini :

Gambar 4.28
Diagram tentang petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa selain berkoordinasi dengan masyarakat petugas pendataan pun berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (70,3%) yang artinya bahwa petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana untuk mengetahui daftar akhir RTS-PM

Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel, sehingga dalam pelaksanaannya mengetahui dengan pasti siapa saja RTS-PM yang berhak menerima.

4.2.4.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

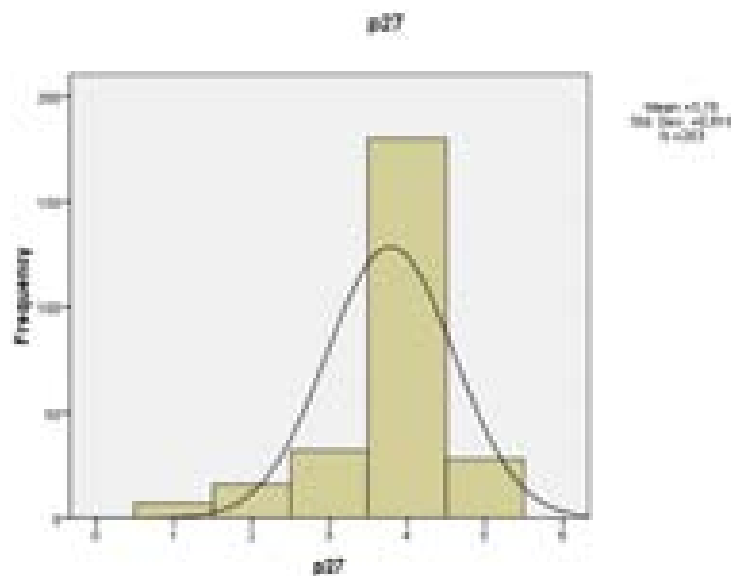
Tabel 4.32.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin dapat mengurangi masalah ekonomi

p27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	7	2,7	2,7	2,7
Tidak Setuju	16	6,1	6,1	8,7
Abstain	32	12,2	12,2	20,9
Setuju	180	68,4	68,4	89,4
Sangat Setuju	28	10,6	10,6	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.32, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 28 orang (10,6%), menjawab setuju 180 orang (68,4%), yang menjawab abstain sebanyak 32 orang (12,2%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 16 orang (6,1%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 orang (2,7%) tentang petugas program Raskin dapat mengurangi masalah ekonomi. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.29 berikut ini :

Gambar 4.29
Diagram tentang program Raskin dapat mengurangi masalah ekonomi



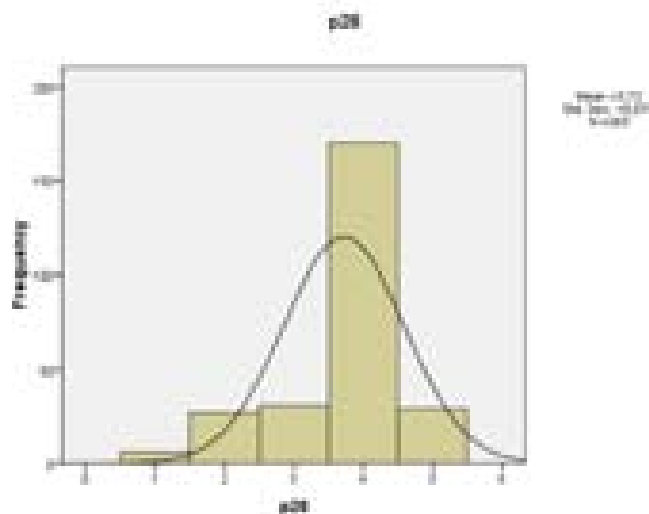
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa program raskin bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sehingga dapat mengurangi masalah ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (68,4%) yang artinya bahwa keberhasilan implementasi program raskin setidaknya dapat mengurangi masalah ekonomi, terlebih manfaat yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat/publik, mengingat kompleksitas masalah ekonomi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan.

Tabel 4.33.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah
 p28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	6	2,3	2,3	2,3
Tidak Setuju	27	10,3	10,3	12,5
Abstain	31	11,8	11,8	24,3
Setuju	170	64,6	64,6	89,0
Sangat Setuju	29	11,0	11,0	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.33, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 29 orang (11,0%), menjawab setuju 170 orang (64,6%), yang menjawab abstain sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 27 orang (10,3%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (2,3%) tentang masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.30 berikut ini :

Gambar 4.30
Diagram tentang masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (64,6%) yang artinya bahwa Program Raskin ini sangat diandalkan, karena bermanfaat bagi warga, mereka dapat membeli beras untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yaitu beras dengan harga yang murah. Program Raskin ini sangat membantu RTS-PM untuk mengurangi beban Rumah Tangga mereka.

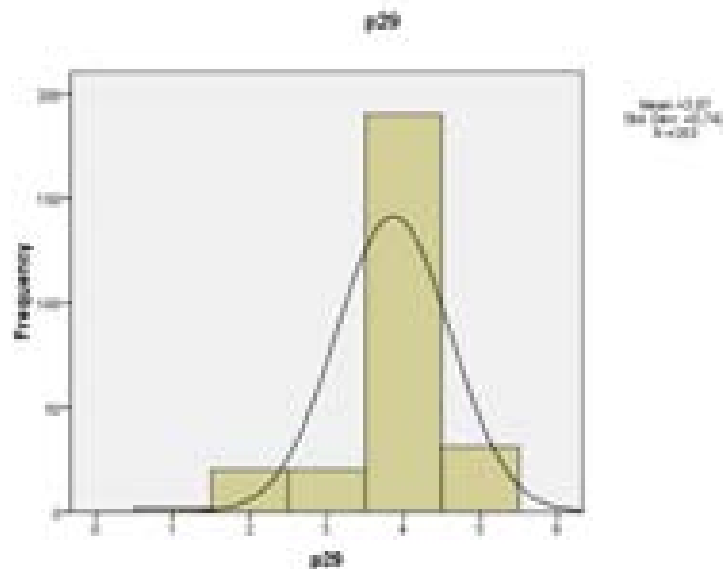
Tabel 4.34.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program mampu mempertahankan daya beli masyarakat

p29

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	,8	,8	,8
Tidak Setuju	20	7,6	7,6	8,4
Abstain	20	7,6	7,6	16,0
Setuju	190	72,2	72,2	88,2
Sangat Setuju	31	11,8	11,8	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.34, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 29 orang (11,0%), menjawab setuju 170 orang (64,6%), yang menjawab abstain sebanyak 31 orang (11,8%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 27 orang (10,3%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (2,3%) tentang program mampu mempertahankan daya beli masyarakat. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.31 berikut ini :

Gambar 4.31
Diagram tentang program mampu mempertahankan daya beli masyarakat



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data program mampu mempertahankan daya beli masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (72,2%) yang artinya bahwa Program Raskin secara ekonomi program mampu mempertahankan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, terkait dengan perubahan yang ingin dicapai, maka pelaksanaan program Raskin ini harus terus dilakukan pembinaan terhadap tugas dan fungsi tim koordinasi, agar hambatan dan masalah spesifik dapat diatasi, sehingga tujuan utama dari program raskin dapat memberikan kesejahteraan hidup RS-PM meningkat.

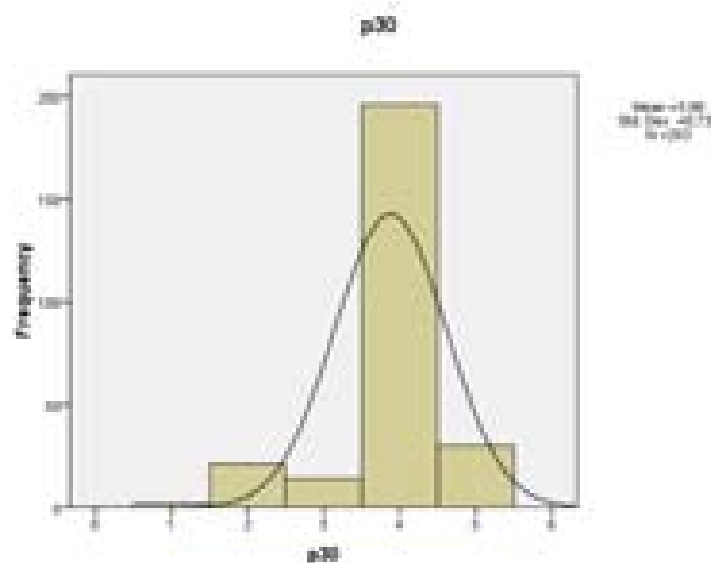
Tabel 4.35.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan

p30

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	,8	,8	,8
Tidak Setuju	21	8,0	8,0	8,7
Abstain	14	5,3	5,3	14,1
Setuju	196	74,5	74,5	88,6
Sangat Setuju	30	11,4	11,4	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Memperhatikan data pada tabel 4.35, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 30 orang (11,4%), menjawab setuju 196 orang (74,5%), yang menjawab abstain sebanyak 14 orang (5,3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 21 orang (8,0%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (0,8%) tentang program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.32 berikut ini :

Gambar 4.32
Diagram tentang program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (74,5%) yang artinya bahwa dengan digulirkannya Program Raskin cukup dalam memecahkan masalah sehingga RTM (Rumah Tangga Miskin) masyarakat sangat menerima dan merespon dengan baik

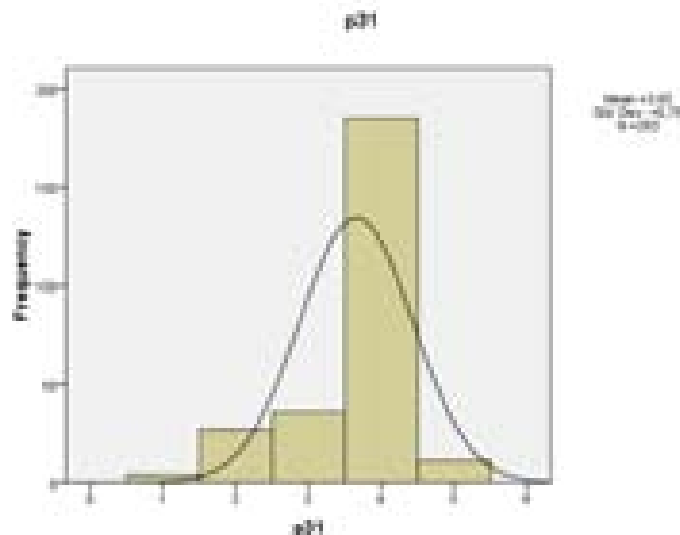
Tabel 4.36.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa merasa terbantu dan meringankan beban hidup dengan adanya program Raskin

p31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	4	1,5	1,5	1,5
Tidak Setuju	27	10,3	10,3	11,8
Abstain	36	13,7	13,7	25,5
Setuju	185	70,3	70,3	95,8
Sangat Setuju	11	4,2	4,2	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.36, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju 11 orang (4,2%), menjawab setuju 185 orang (70,3%), yang menjawab abstain sebanyak 36 orang (13,7%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 27 orang (10,3%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (1,5%) tentang merasa terbantu dan meringankan beban hidup dengan adanya program Raskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.33 berikut ini :

Gambar 4.33
Diagram tentang merasa terbantu dan meringankan beban hidup dengan adanya program Raskin



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data program Raskin di Kelurahan Karang Anyar dapat membantu dan meringankan beban hidup masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (70,3%) yang artinya bahwa implementasi kebijakan penyaluran raskin pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan tidak lebih dan tidak kurang dapat membantu dan meringankan beban hidup masyarakat miskin.

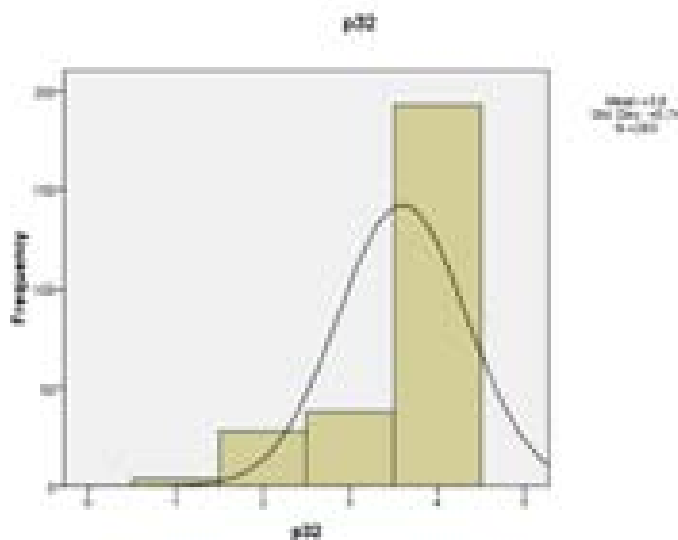
Tabel 4.37.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin

p32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	1,5	1,5	1,5
	Tidak Setuju	28	10,6	10,6	12,2
	Abstain	38	14,4	14,4	26,6
	Setuju	193	73,4	73,4	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.37, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju 193 orang (73,4%), yang menjawab abstain sebanyak 38 orang (14,4%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 28 orang (10,6%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (1,5%) tentang program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.34 berikut ini :

Gambar 4.34
Diagram tentang program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin di Kelurahan Karang Anyar. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (73,4%) yang artinya bahwa implementasi kebijakan penyaluran raskin dapat memenuhi sebagian pangan beras Rumah Tangga Sasaran.

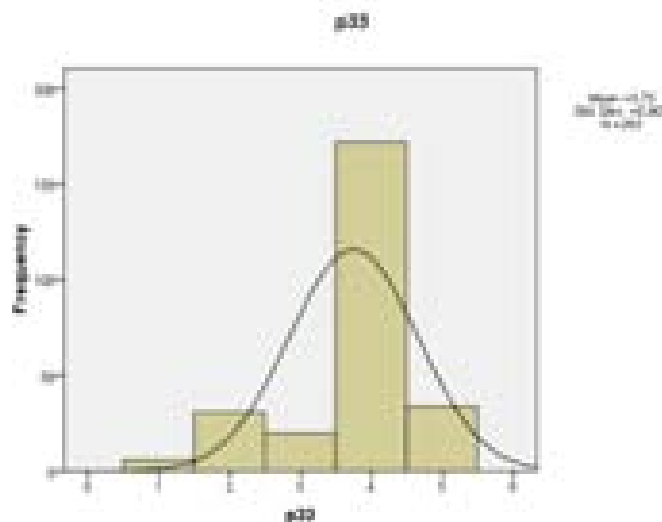
Tabel 4.38.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa sosialisasi program Raskin sudah berjalan dengan baik

p33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	6	2,3	2,3	2,3
Tidak Setuju	31	11,8	11,8	14,1
Abstain	20	7,6	7,6	21,7
Setuju	172	65,4	65,4	87,1
Sangat Setuju	34	12,9	12,9	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.38, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 34 orang (12,9%), yang menjawab setuju sebanyak 172 orang (65,4%), yang menjawab abstain sebanyak 20 orang (7,6%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 31 orang (11,8%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 orang (2,3%) tentang sosialisasi program Raskin sudah berjalan dengan baik. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.35 berikut ini :

Gambar 4.35
Diagram tentang sosialisasi program Raskin sudah berjalan dengan baik



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa sosialisasi program raskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (65,4%) yang artinya bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Raskin sebelumnya telah dilakukan sosialisasi. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

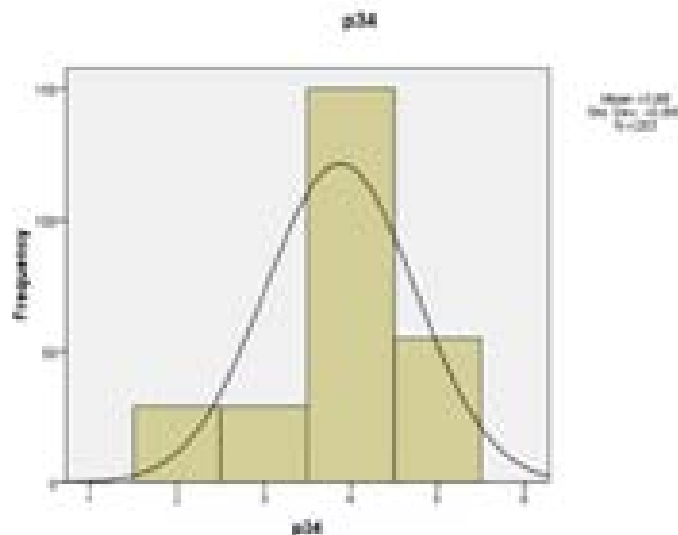
Tabel 4.39.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah

p34

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	29	11,0	11,0	11,0
Abstain	29	11,0	11,0	22,1
Setuju	150	57,0	57,0	79,1
Sangat Setuju	55	20,9	20,9	100,0
Total	263	100,0	100,0	

Data pada tabel 4.39, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 55 orang (20,9%), yang menjawab setuju sebanyak 150 orang (57,0%), yang menjawab abstain sebanyak 29 orang (11,0%), dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 29 orang (11,0%) tentang masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.36 berikut ini :

Gambar 4.36
Diagram tentang masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa masyarakat memandang positif terhadap penyelenggaraan program Raskin dari Pemerintah.. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (57,0%) mengingat Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1, yaitu Program Perlindungan Sosial.

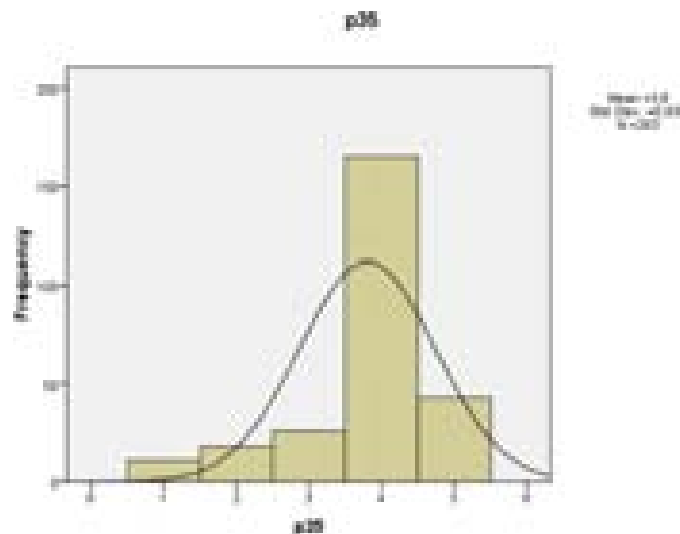
Tabel 4.40.
Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pendistribusian Raskin telah merata hanya kepada masyarakat miskin

p35

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	4,2	4,2	4,2
	Tidak Setuju	18	6,8	6,8	11,0
	Abstain	26	9,9	9,9	20,9
	Setuju	165	62,7	62,7	83,7
	Sangat Setuju	43	16,3	16,3	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

Berdasarkan data pada tabel 4.40, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang (16,3%), yang menjawab setuju sebanyak 165 orang (62,7%), yang menjawab abstain sebanyak 26 orang (9,9%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 orang (6,8%) dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 11 orang (4,2%) tentang pendistribusian Raskin telah merata hanya kepada masyarakat miskin. Adapun data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut ini :

Gambar 4.37
Diagram tentang masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah



Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diperoleh suatu penafsiran data bahwa telah merata kepada masyarakat miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju (62,7%) yang artinya bahwa pendistribusian yang merata disesuaikan dengan pagu Raskin dan ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan updating penerima KPS.

4.3. Pengujian Persyaratan Statistik

4.3.1. Uji Validitas Instrumen

Untuk mengetahui kelayakan instrumen penelitian, maka penulis mengadakan uji validitas instrumen penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan penginputan atau merekapitulasi data hasil angket di Program Excel seperti terlampir, pengujian ini ditujukan kepada masyarakat yang mengetahui dan atau penerimaan manfaat dari Program Beras Rumah Tangga Miskin di Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Uji Validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Adapun rumus yang digunakan adalah menggunakan statistik korelasi product moment dengan bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 19.0 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.41
Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pernyataan)

Correlations				
		r hitung	r tabel	Keterangan
p1	Pearson Correlation	0,821	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p2	Pearson Correlation	0,590	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p3	Pearson Correlation	0,797	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p4	Pearson Correlation	0,846	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		

p5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,716 0,000 263	0,133	Valid
p6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,901 0,000 263	0,133	Valid
p7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,812 0,000 263	0,133	Valid
p8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,682 0,000 263	0,133	Valid
p9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,681 0,000 263	0,133	Valid
p10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,661 0,000 263	0,133	Valid
p11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,849 0,000 263	0,133	Valid
p12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,838 0,000 263	0,133	Valid
p13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,760 0,000 263	0,133	Valid
p14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,820 0,000 263	0,133	Valid
p15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,824 0,000 263	0,133	Valid
p16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,678 0,000 263	0,133	Valid
p17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,678 0,000 263	0,133	Valid
p18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,757 0,000 263	0,133	Valid
p19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,882 0,000 263	0,133	Valid
p20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	0,816 0,000	0,133	Valid

	N	263		
p21	Pearson Correlation	0,794	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p22	Pearson Correlation	0,709	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p23	Pearson Correlation	0,780	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p24	Pearson Correlation	0,838	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p25	Pearson Correlation	0,717	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p26	Pearson Correlation	0,894	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p27	Pearson Correlation	0,823	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p28	Pearson Correlation	0,672	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p29	Pearson Correlation	0,674	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p30	Pearson Correlation	0,756	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p31	Pearson Correlation	0,880	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p32	Pearson Correlation	0,819	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p33	Pearson Correlation	0,801	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p34	Pearson Correlation	0,709	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		
p35	Pearson Correlation	0,765	0,133	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000		
	N	263		

Berdasarkan tabel 4.41, uji validitas untuk instrumen implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 35 butir pertanyaan yang diuji menunjukkan hasil yang valid (sah) karena bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 95 persen atau dengan kata lain memiliki tingkat kesalahan sebesar 5 persen, maka item instrumen dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} = r_{tabel}$, berarti item instrumen dinyatakan tidak valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 19.0. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,980. Jika kita mengacu pada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen adalah 0,3 artinya $0,980 > 0,3$ sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel.

Tabel 4.42
Hasil Uji Reliabilitas Alpha Cronbach

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,980	35

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016.

4.3.3. Uji Frekuensi dan Normalitas Data

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil penelitian ini maka peneliti mencoba untuk melakukan mean, median dan modus dan normalitas data guna menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistik non parametric sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah statistik parametric . Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 19.0. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.43 dibawah ini.

Tabel 4.43
Standar Deviasi Implementasi Program Raskin

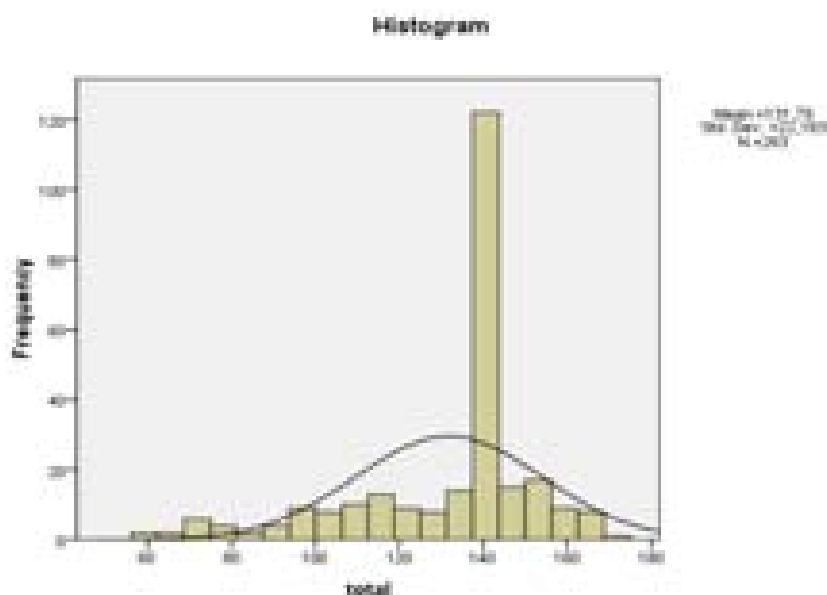
Statistics		
total		
N	Valid	263
	Missing	0
Mean		131,79
Std. Error of Mean		1,368
Median		140,00
Mode		140
Std. Deviation		22,183
Variance		492,077
Skewness		-1,286
Std. Error of Skewness		,150
Kurtosis		1,384
Std. Error of Kurtosis		,299
Range		114
Minimum		58
Maximum		172
Sum		34660

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2016.

Dari tabel 4.43 dapat diketahui bahwa rata-rata atau mean dari nilai Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin diketahui sebesar 131,79 dengan standar error of mean 1,368. Dengan demikian rata-rata Implementasi

Program Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar yang merupakan sampel penelitian adalah berkisar antara $\text{mean} \pm (2 \times 1,299)$ atau berkisar 131,79. Standar deviasi Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin sebesar 22,183 artinya sebaran data berkisar antara 22,183.

Adapun nilai distribusinya juga dapat diketahui distribusi Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin adalah normal. Hal ini diketahui dari skewness sebesar -1,286 dan kurtosis yang menunjukkan nilai sebesar -1,384, dimana nilai ini berada pada angka kisaran antara -1 hingga 1 atau -2 hingga 2, berarti distribusi data Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang adalah normal. Apabila digambarkan bentuk distribusi data Implementasi Program Raskin dapat dilihat pada grafik gambar berikut ini.



Gambar 4.38.
Grafik Distribusi Data Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin

4.4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut: **“Implementasi Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang berjalan sesuai dengan kebijakan Raskin apabila mencapai angka minimal 70%”**. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yakni sebagai berikut.

Dari data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah $5 \times 35 \times 263 = 46025$. (5 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 35 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 263 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan rata-rata $46025 : 263 = 175$. Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, nilai yang dihipotesiskan adalah tertinggi 70% dari nilai ideal. Ini berarti bahwa $0,70 \times 46025 = 32217,5$ dibagi $263 = 122,5$. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ lebih tinggi dari 70% atau dari skor ideal paling tinggi. Sedangkan H_a lebih besar dari 70% dari skor ideal yang diharapkan. Atau dapat ditulis dengan rumus:

$$H_0 = \mu = 70\% \leq 0,70 \times 46025 : 263 = 122,5$$

$$H_a = \mu > 70\% > 0,70 \times 46025 : 263 = 122,5$$

Diketahui :

$$\bar{X} = \sum X : 263 = 34660 : 263 = 131,79$$

$$\mu_0 = 70\% = 0,70 \times 46025 : 263 = 122,5$$

$$s = 22,183$$

$$n = 263$$

ditanya : t ?

Dimana :

t = nilai yang dihitung

x = nilai rata-rata

μ_0 = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \\
 &= \frac{131,79 - 122,5}{\frac{22,183}{\sqrt{263}}} \\
 &= \frac{9,29}{16,22}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{9,29}{1,37}$$

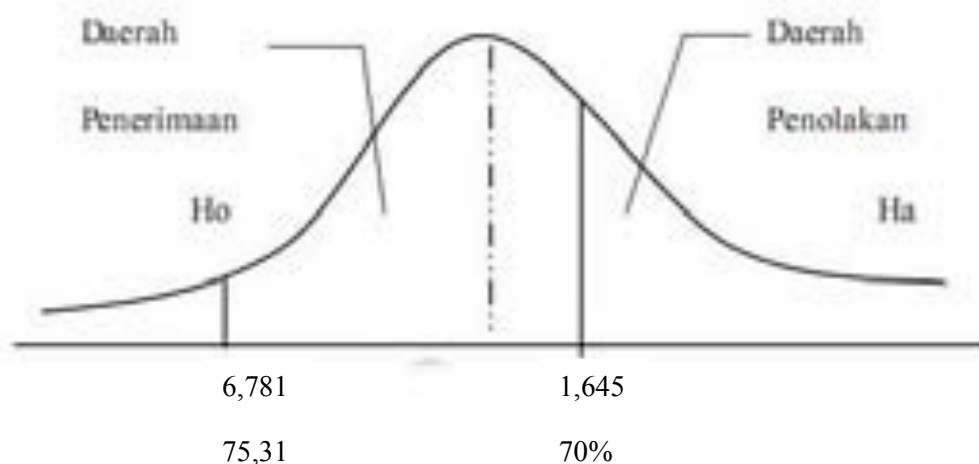
$$= 6,781$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 263 - 1 = 262$ dan taraf kesalahan = 5% untuk uji satu pihak (*one tail test*). Berdasarkan dk 262 dan $\alpha = 5\%$, ternyata harga t tabel untuk uji satu pihak = 1,645 karena harga t hitung lebih besar dari pada harga t tabel atau jatuh pada penerimaan H_0 ($6,781 > 1,645$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari perhitungann populasi ditemukan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang :

$$\text{Implementasi Program Raskin} = \frac{34660}{46025} \times 100\% = 75,31$$

Jadi telah diketahui bahwa Implementasi Program Raskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang adalah sebesar 75,31%.



Gambar 4.39
Uji Hipotesis Pihak Kanan

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang > dari 70%. Kemudian peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu warga berada di 15 RT di wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang mengetahui ataupun yang menerima program (RTS-PM) sebanyak 263 orang. Peneliti mencoba menginterpretasikan data hasil temuan di lapangan mengenai Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah “**Bagaimana Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang**” dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn terkait pengaruh kinerja pelaksanaan dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (*Disposition*) para pelaku, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dimana ukuran kinerja pelaksanaan ini akan menggambarkan dan menilai proses pelaksanaan Program Beras Rumah Tangga Miskin di Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil analisa rumusan masalah yang telah dibahas ini, dapat dilihat bahwa dari perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan menguji pihak kanan adalah bila harga t-hitung lebih kecil atau sama dengan (=) harga t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Karena H_0 (6,781 >

1,645) maka H_0 ditolak dan H_a diterima ini berarti H_a dapat diterima karena lebih > dari 70%.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah $5 \times 35 \times 263 = 46025$. (5 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 35 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 263 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 34660. Dengan demikian nilai Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang adalah $34660 : 46025 = 0,753$ atau 75,31%. Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah adalah : “Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik.

4.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat kembali bahwa kepada teori Implementasi kebijakan publik model Donalld Van Metter dan Van Horn yaitu model pendekatan top-down yang disebut dengan A Model Of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstrak performansi suatu implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn,

yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap atau kecenderungan para pelaku; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas para pelaksana; dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Sub variabel pertama yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Maksud dari ukuran dan tujuan kebijakan disini ialah seberapa besar hasil dari kinerja implementasi kebijakan tim pelaksana Program Beras Rumah Tangga Miskin. Jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksanaan kebijakan, Maka Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sub variabel kedua yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi yaitu sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Mengingat Program Beras Rumah Tangga Miskin adalah program pengentasan kemiskinan di masyarakat maka seharusnya dapat memiliki berbagai sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu berupa sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial yang merupakan sumberdaya penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin.

Sub variabel ketiga yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi yaitu karakteristik agen pelaksana. kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok

dengan para agen pelaksanaannya. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dicermati dalam sub variabel ini yaitu seberapa jauh tim pelaksana kebijakan berperan aktif menjalankan kebijakan penyaluran ataupun mendistribusikan Beras Rumah Tangga Miskin kepada masyarakat penerima manfaat.

Sub variabel keempat yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi yaitu sikap atau kecenderungan para pelaku. Sikap menerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan-keberhasilan atau tindakannya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil murni masyarakat yang mengetahui betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Sub variabel kelima yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi yaitu komunikasi antar organisasi. Koordinasi antara tim pelaksana program raskin karena hal ini menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak pelaksana kebijakan yang terlibat dalam suatu proses, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Sub variabel keenam yang digunakan dalam mengukur implementasi yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hal terakhir yang juga harus diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena

itu, upaya untuk mengimplementasikan program beras rumah tangga miskin agar berjalan sesuai dengan tujuan harus memperhatikan faktor kondisi lingkungan eksternal. Oleh karena itu dengan adanya Program Beras Rumah Tangga Miskin dapat meminimalisir beban ekonomi masyarakat sekaligus diharapkan dalam pelaksanaannya saling terjadi harmonisasi mengacu pada prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program RASKIN dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab 1 mengenai **Bagaimana Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang**?, yaitu bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan perhitungan dan pengujian hipotesis diketahui bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin adalah sebesar 75,31 persen. Hal tersebut berarti bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Skor ideal instrumen adalah $5 \times 35 \times 263 = 46025$. (5 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 35 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 263 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 34660. Dengan demikian nilai Implementasi

Program Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari adalah $34660 : 46025 = 0,753$ atau 75,31%. Pengujian hipotesis pada bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan data yang terkumpul dapat diketahui bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mencapai angka 75,31 persen dari yang diharapkan.

Pembahasan ini pada intinya menyatakan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan maksimal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik. Namun sebelumnya, peneliti memiliki hipotesis **“Implementasi Kebijakan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang berjalan sesuai dengan kebijakan Raskin apabila mencapai angka minimal 70%”**. Hal ini, terbukti dari uji statistik dimana dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti dapat melihat dari perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan menguji pihak kanan adalah harga t-hitung lebih besar dari harga t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena t hitung (6,781) > t tabel (1,645), maka H_0 ditolak dan H_a diterima ini berarti H_a dapat diterima karena > dari 70%. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sudah terlaksanakan dengan baik dan berjalan maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan program raskin yang telah ditetapkan dengan, sekalipun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kendala dan hambatan yang dihadapi, akan tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan program raskin dapat tercapai dan mencapai angka 75,31 persen dari nilai yang diharapkan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program beras rumah tangga miskin di Kecamatan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dengan menerapkan model teori implementasi kebijakan dari Meter dan Horn bahwa kriteria dalam mengukur implementasi program raskin yang terdiri dari : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik mencapai 75,31 persen sekalipun dalam pelaksanaannya banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut maka saran yang perlu diperhatikan sebagai acuan atau masukan dan bahan pertimbangan untuk Tim Pelaksana kebijakan ataupun stakeholder lainnya sebagai berikut:

1. Mengenai kinerja para pelaksana kebijakan dimana tim koordinasi Program Raskin terus berupaya meningkatkan kinerja mereka ketaraf yang lebih optimal, salah satunya dalam hal pengambilan keputusan para pelaksana program kebijakan di Kelurahan Karang Anyar dinilai masih lemah dalam mengambil keputusan, padahal dalam pelaksanaan program raskin ini memerlukan waktu, tenaga, pikiran dan kinerja yang optimal agar hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Peningkatan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu SDM, salah satunya dalam pengolahan data yang

dilaporkan secara berjenjang, yaitu data hasil Musyawarah Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan. Hal ini disebabkan karena ada saja RTS-PM yang tidak dapat menerima jatah raskin tersebut.

3. Respon tingkat kecamatan dan kelurahan dalam menyikapi dan menindaklanjuti adanya pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan kesalahan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu kurang ditindak lanjuti dengan baik.
4. Sikap para pelaksana kebijakan harusnya dapat menindaklanjuti pengaduan dan diberitahukan secara langsung agar hasil kebijakan program beras rumah tangga miskin yang dilaksanakan secara musyawarah warga desa agar segala keputusan dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan warga.
5. Menciptakan komunikasi yang baik antara warga dengan tim pelaksana kebijakan Raskin dengan cara meningkatkan volume pertemuan yang lebih sering antar warga dengan tim pelaksana kebijakan, sehingga realisasi permasalahan program Raskin yang terjadi lapangan perlu diperbaiki dan dicarikan solusi agar beberapa kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya program raskin.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik harus diperhatikan oleh tim pelaksana kebijakan Raskin karena segala kebijakan baik itu program yang di jalankan yang pastinya akan terkena dampak eksterna (ekonomi, sosial, politik), yang nantinya segala program yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Zaid. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agusyana. Yus. 2011. *Olah Data Skripsi dan Penelitian*. Jakarta : PT. Ekex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lain*. Jakarta : Kencana.
- Hartomo, H. dan Arnicun, Aziz. 2004. *Ilmu Dasar Sosial cet.6*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Latief, Abdul Madjid. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : Penerbit PMN.
- Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyawati, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama.

Solichin, Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan (Dan formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sukardi. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sunggono, Bambang, 2004. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

_____. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta : PT. Buku Seru

Dokumen :

Pedoman Umum Penyaluran Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat. Tim Koordinasi Raskin Pusat Tahun 2013.

Keputusan Walikota Tangerang Nomor 405/Kep.41-Dinsos/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Berat Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Tangerang Tahun 2014.

Profil Kinerja SKPD Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2014.

Sumber Lain :

Unduh pada : suyatno.blog.undip.ac.id/files/-indikator-kemiskinan.pdf pada Rabu, 08 Desember 2015.

Berita Online : TANGERANG (Pos Kota), 2014.

Lampiran 1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Di –
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakan kegiatan Skripsi yang sedang saya lakukan di Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, maka saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hijriatul Mabruk
NIM : 6661091655
Mahasiswa : Fakultas FISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VIII
Judul Skripsi : Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk melengkapai data-data yang saya butuhkan untuk itu saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu saya mengisi pernyataan-pernyataan pada angket atau kuesioner yang saya berikan.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Peneliti,

Hijriatul Mabruk

JUDUL PENELITIAN

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG

INFORMASI RESPONDEN

Mohon diisi dan coret yang tidak perlu. *)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan : SD
 SMP
 SMA
 Lainnya

KUSIONER

Petunjuk pengisian :

1. Mohon bapak/ibumembaca pernyataan dengan seksama.
2. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda (√) dikolom jawaban yang tersedia.
3. Terimakasih atas waktu dan kesediaan bapak/ibu

KETERANGAN :

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
A : Abstain
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	A	TS	STS
Ukuran dan Tujuan Kebijakan						
1	Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Program Raskin sudah berjalan dengan baik					
2	Kebijakan mengenai program Raskin sudah sesuai dengan harapan					
3	Pencapaian hasil dari program raskin berjalan maksimal					
4	Masyarakat rumah tangga sasaran penerima manfaat mengetahui tentang kejelasan program Raskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah					
5	Masyarakat RTS-PM mengetahui semua tata cara mendapatkan program Raskin dari pemerintah					
6	Masyarakat miskin merasakan kepuasan dengan adanya program raskin yang telah diterima					
Sumber Daya						
7	Proses pendataan masyarakat miskin yang layak menerima manfaat Raskin oleh petugas pelaksana sudah tepat sasaran					
8	Dalam pelaksanaannya Program Raskin ini sudah menjangkau masyarakat miskin di daerah anda					
9	Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	A	TS	STS
	manfaat Raskin tidak dipungut biaya/harga yang tidak sesuai dalam proses pelayanannya					
10	Program Raskin yang disalurkan di daerah anda sudah mencukupi kebutuhan masyarakat miskin					
11	Pemerintah memberikan jangka waktu terhadap berlakunya program Raskin					
12	Proses penyaluran distribusi beras Raskin dinilai tepat waktu					
13	Dalam memberikan pelayanan, pihak/tim pelaksana Raskin sudah bekerja sangat cepat					
14	Proses pendistribusi Raskin Sudah Sesuai Dan Teratur					
Karakter Agen Pelaksana						
15	Prosedur program Raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah					
16	Adanya dukungan dari Pemerintah daerah mengenai program Raskin					
17	Volume beras yang didistribusikan pemerintah memberikan kecukupan dengan jumlah RTS-PM					
18	Pemerintah memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan terkait dengan penyelenggaraan program Raskin					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	A	TS	STS
19	Dalam memberikan pelayanan, mulai dari pendataan sampai dengan penyalurannya para Tim Pelaksana Raskin sudah bekerja sangat adil					
Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana						
20	Masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam Program Raskin.					
21	Dalam program Raskin ini masyarakat dilayani dengan penuh tanggung jawab					
22	Petugas atau tim pelaksana Raskin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhak menerima kebijakan pemerintah ini					
23	Para tim pelaksana Raskin memberikan pelayanan dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima jatah Raskin					
24	Selain itu para tim dan pelaksana lainnya memberikan pelayanan dengan ramah					
Komunikasi Antar Organisasi						
25	Petugas berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan program Raskin					
26	Petugas pendataan berkoordinasi dengan tim pelaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Raskin					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	A	TS	STS
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik						
27	Program Raskin dapat mengurangi masalah ekonomi					
28	Masyarakat RTS-PM penerima Raskin sangat mengandalkan adanya program Raskin dari pemerintah					
29	Program mampu mempertahankan daya beli masyarakat					
30	Program Raskin cukup memecahkan masalah kemiskinan					
31	Merasa terbantu dan meringankan beban hidup dengan adanya program Raskin					
32	Program Raskin sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat miskin					
33	Sosialisasi program Raskin sudah berjalan dengan baik					
34	Masyarakat mempunyai pandangan positif tentang program Raskin dari pemerintah					
35	Pendistribusian Raskin telah merata hanya kepada masyarakat miskin					

Lampiran 3

Hasil Uji Validitas Instrumen Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin

		total
p1	Pearson Correlation	0,821
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p2	Pearson Correlation	0,590
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p3	Pearson Correlation	0,797
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p4	Pearson Correlation	0,846
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p5	Pearson Correlation	0,716
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p6	Pearson Correlation	0,901
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p7	Pearson Correlation	0,812
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p8	Pearson Correlation	0,682
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p9	Pearson Correlation	0,681
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p10	Pearson Correlation	0,661
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p11	Pearson Correlation	0,849
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p12	Pearson Correlation	0,838
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p13	Pearson Correlation	0,760
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263

p14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,820 0,000 263
p15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,824 0,000 263
p16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,678 0,000 263
p17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,678 0,000 263
p18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,757 0,000 263
p19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,882 0,000 263
p20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,816 0,000 263
p21	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,794 0,000 263
p22	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,709 0,000 263
p23	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,780 0,000 263
p24	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,838 0,000 263
p25	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,717 0,000 263
p26	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,894 0,000 263
p27	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,823 0,000 263
p28	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,672 0,000 263
p29	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	0,674 0,000 263

p30	Pearson Correlation	0,756
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p31	Pearson Correlation	0,880
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p32	Pearson Correlation	0,819
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p33	Pearson Correlation	0,801
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p34	Pearson Correlation	0,709
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
p35	Pearson Correlation	0,765
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	263
total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	N	263

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	263	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	263	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,980	35

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	128,14	461,187	,807	,979
p2	128,02	474,725	,569	,980
p3	128,02	462,477	,782	,979
p4	128,05	460,597	,835	,979
p5	127,95	468,081	,698	,980
p6	128,06	459,374	,894	,979
p7	127,97	464,362	,800	,979
p8	128,09	465,698	,660	,980
p9	127,91	470,309	,663	,980
p10	128,02	471,816	,642	,980
p11	128,05	460,708	,837	,979
p12	128,10	461,929	,826	,979
p13	128,03	463,923	,743	,980
p14	128,02	463,236	,807	,979
p15	127,99	461,458	,811	,979
p16	128,08	466,322	,655	,980
p17	127,91	470,569	,659	,980
p18	127,94	466,656	,742	,980

p19	128,13	462,365	,874	,979
p20	128,18	466,073	,804	,979
p21	128,02	461,404	,778	,979
p22	127,91	465,595	,689	,980
p23	127,95	461,555	,764	,979
p24	128,06	459,977	,826	,979
p25	127,95	468,139	,699	,980
p26	128,05	460,169	,886	,979
p27	128,00	462,927	,811	,979
p28	128,07	466,720	,649	,980
p29	127,92	470,440	,655	,980
p30	127,91	467,915	,741	,980
p31	128,13	462,223	,872	,979
p32	128,19	465,750	,808	,979
p33	128,04	460,686	,785	,979
p34	127,91	465,595	,689	,980
p35	127,98	461,175	,747	,980

Lampiran 5

Hasil Uji Normalitas Data

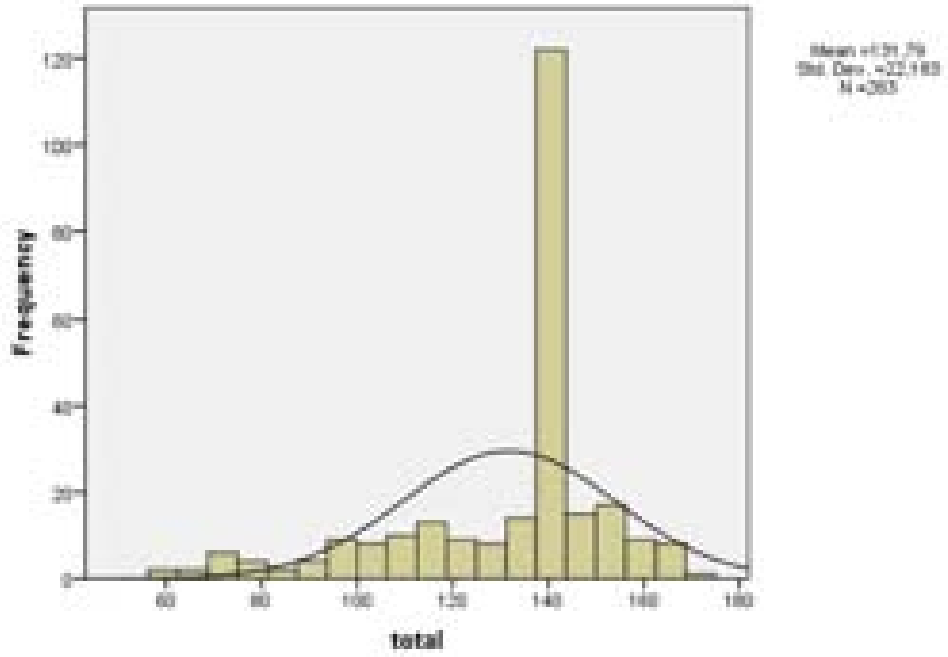
Statistics

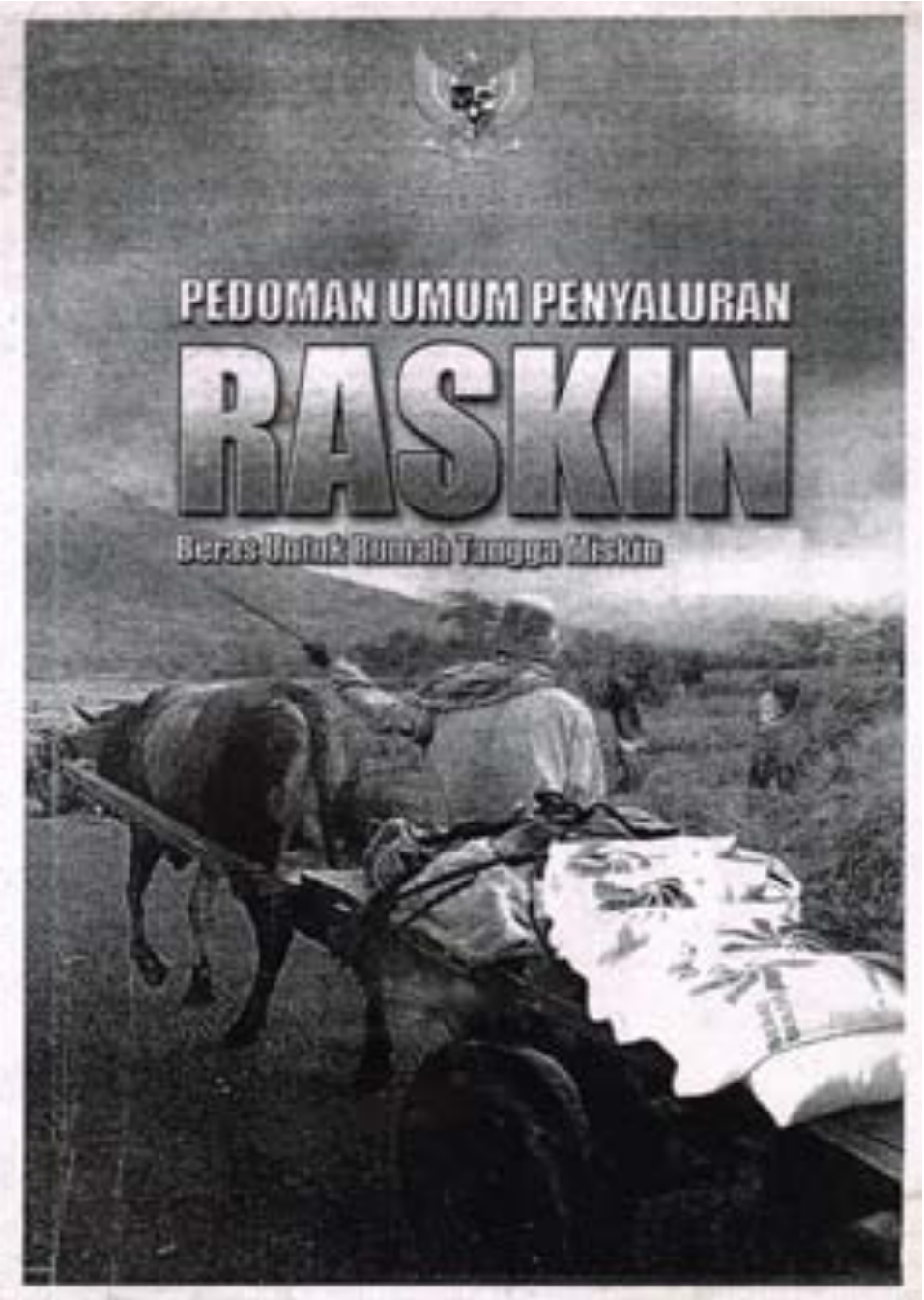
total		
N	Valid	263
	Missing	0
Mean		131,79
Std. Error of Mean		1,368
Median		140,00
Mode		140
Std. Deviation		22,183
Variance		492,077
Skewness		-1,286
Std. Error of Skewness		,150
Kurtosis		1,384
Std. Error of Kurtosis		,299
Range		114
Minimum		58
Maximum		172
Sum		34660

total

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	58	1	,4	,4	,4
	59	1	,4	,4	,8
	66	2	,8	,8	1,5
	70	2	,8	,8	2,3
	72	1	,4	,4	2,7
	73	1	,4	,4	3,0
	74	2	,8	,8	3,8
	77	3	1,1	1,1	4,9
	78	1	,4	,4	5,3
	82	1	,4	,4	5,7
	85	1	,4	,4	6,1
	89	1	,4	,4	6,5
	91	1	,4	,4	6,8
	92	1	,4	,4	7,2
	93	1	,4	,4	7,6
	96	1	,4	,4	8,0
	97	2	,8	,8	8,7
	99	6	2,3	2,3	11,0
	100	1	,4	,4	11,4
	101	3	1,1	1,1	12,5
	102	2	,8	,8	13,3
	103	1	,4	,4	13,7
	105	1	,4	,4	14,1
	107	2	,8	,8	14,8
	108	2	,8	,8	15,6
	109	2	,8	,8	16,3
	110	2	,8	,8	17,1
	112	2	,8	,8	17,9
	113	1	,4	,4	18,3
	115	6	2,3	2,3	20,5
	116	2	,8	,8	21,3
	117	1	,4	,4	21,7
	118	3	1,1	1,1	22,8
	119	1	,4	,4	23,2
	120	6	2,3	2,3	25,5
	121	1	,4	,4	25,9
	122	1	,4	,4	26,2
	126	1	,4	,4	26,6
	127	3	1,1	1,1	27,8
	128	1	,4	,4	28,1
	129	2	,8	,8	28,9
	130	1	,4	,4	29,3
	132	1	,4	,4	29,7
	134	4	1,5	1,5	31,2
	136	6	2,3	2,3	33,5
	137	3	1,1	1,1	34,6
	138	5	1,9	1,9	36,5
	140	103	39,2	39,2	75,7
	142	12	4,6	4,6	80,2
	143	2	,8	,8	81,0
	145	7	2,7	2,7	83,7
	146	1	,4	,4	84,0
	147	6	2,3	2,3	86,3
	148	1	,4	,4	86,7
	153	7	2,7	2,7	89,4
	155	5	1,9	1,9	91,3
	156	5	1,9	1,9	93,2
	158	8	3,0	3,0	96,2
	161	1	,4	,4	96,6
	164	1	,4	,4	97,0
	166	7	2,7	2,7	99,6
	172	1	,4	,4	100,0
	Total	263	100,0	100,0	

total





Tahapan Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin

1. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah:

- a. Undang-Undang No. B Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985.
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
- f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. -
- g. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- k. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- l. Peraturan Presiden RI No 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- m. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
- n. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- o. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- p. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
- q. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- r. Instruksi Mendagri No.: 541/3150/S1 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/S1 tahun. 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

2. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

- a. Tujuan
Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras
- b. Sasaran
Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan
- c. Manfaat
Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:
 - 1) Stabilisasi harga beras di pasaran.
 - 2) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
 - 3) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.

- 4) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- 5) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- 6) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pengelolaan dan Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Peiaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

a. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat.

1) Tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
- b) Penetapan Pagu Raskin.
- c) Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.
- d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di provinsi dan kabupaten/kota.

3) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kepmenko Kesra) No. 57 Tahun 2012, Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua V/Bidang Pengendalian dan Pelaporan adalah Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat BPKP.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum BULOG.

b. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi.
- b) Penetapan Pagu Raskin kabupaten/kota.
- c) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2014 (Raskin).
- d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.
- f) Penanganan Pengaduan di provinsi.
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- e) Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- i) Penanganan pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat. Dinas Sosial, unsur pengawasan di Kabupaten/Kota, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS

Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c) Pendistribusian Raskin.
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- f) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- g) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (K5K).

e. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut :

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3) Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- a) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- b) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- c) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandaanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- d) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

4. Perencanaan Dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2014 mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1) Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- b) Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014

ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.

c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

2) Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

3) Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/ kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

b. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1) Anggaran subsidi Raskin 2014 disediakan dalam APBN Tahun 2014, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TO.

2) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/S1 tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)

mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juklak/Juknis di masing-masing daerah.

5. Mekanisme Pelaksanaan

a. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/keurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1) Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

a) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.

- b) Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - c) Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.bulog.co.id) pada akhir tahun 2013.
- 2) Pembuatan Pedoman Khusus Raskin
- a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/Lterkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
 - b) Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - c) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- 3) Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)
- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
 - b) Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi

dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

- c) Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - d) Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat.
- 4) Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)
- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
 - b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada - di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - d) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.
- b. Penetapan Pagu Raskin**
- 1) Penetapan Pagu Raskin Nasional**
- a) Pagu Raskin Nasional tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2014.
 - b) Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data

Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada sistem elektronik pada bulan November 2013. Basis Data Terpadu bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.

- c) Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.
- d) Besaran Pagu Raskin Nasional tahun 2014 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- e) Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR RI dapat menambah alokasi pagu Raskin Nasional pada tahun 2014.
- f) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2015.
- g) Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka Menko Kesra, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

2) Penetapan Pagu Raskin Provinsi

- a) Pagu Raskin Provinsi tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2014, sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk

Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.

- b) Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2014 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

- a) Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- b) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.
- c) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2014 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.

- b) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

c. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

- 1) Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTSPM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- 2) RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- 3) Bagi ITS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- 4) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada

Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

- 5) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013.
- 6) Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- 7) Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 8) Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
- 9) Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data ITS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
- 10) FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 11) FRP berserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

d. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- 1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- 2) Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
- 3) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

e. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (money) penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Money dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan money ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

f. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

- 1) Penyediaan Beras Raskin
Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2) Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

3) Mekanisme Penyaluran

- a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- c) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
- d) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
- f) Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.

g. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- 1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- 2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang

diserahkan oleh Perum BULOG di TD.

- 3) Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- 4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler' oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin. -

h. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- 2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

i. Pembayaran Harga Tabus Beras Raskin (HTR)

- 1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
- 2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang I-TR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

j. Pembiayaan

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.

- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

6. Pengendalian

a. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan KeMenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

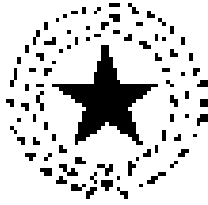
b. Pelaporan

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap triwulan.
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
- 6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

7. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- a. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- b. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
- c. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.
- d. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti.
- e. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- f. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum



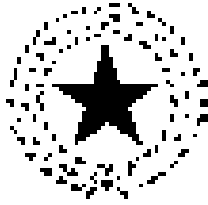
**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
KEBIJAKAN PERBERASAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
- b. bahwa sebagai akibat dari perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri ...



- 2 -

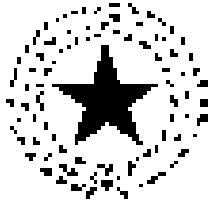
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Para Gubernur;
17. Para Bupati dan Walikota.

Untuk, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat.

KEDUA : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usaha tani padi.

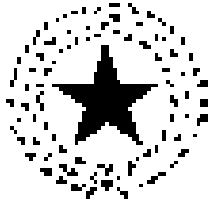
KETIGA ...



- 3 -

- KETIGA : Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi.
- KEEMPAT : Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis.
- KELIMA : Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi.
- KEENAM : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi dibidang usaha padi.
- KETUJUH : Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:
1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp 2.440,00 (dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
 2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp 3.040,00 (tiga ribu empat puluh rupiah) per kilogram di gudang Bulog;

3. Harga ...



- 4 -

3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Bulog;
4. Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

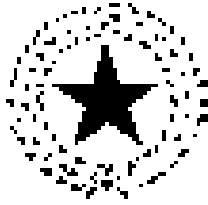
KEDELAPAN : 1. Pelaksanaan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog;

2. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

KESEMBILAN : 1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;

2. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan;

3. Penyediaan ...



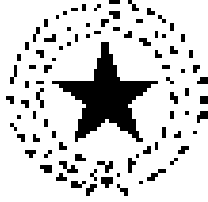
- 5 -

3. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta penyediaan dan penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan dilaksanakan oleh Perum Bulog.

KESEPULUH : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

- KESEBELAS :
1. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur dalam Diktum KETUJUH Instruksi Presiden ini;
 2. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog;
 3. Pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh Pemerintah di daerah, selain untuk Cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog, dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

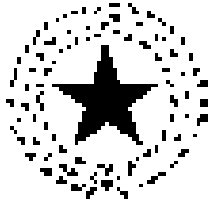
KEDUA BELAS ...



- 6 -

- KEDUA BELAS : 1. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras secara terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
3. Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.
- KETIGA BELAS : Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini.
- KEEMPAT BELAS : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini.
- KELIMA BELAS : Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...



- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Daftar Riwayat Hidup



IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap : Hijriatul Mabruk
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 18 Juni 1991
Alamat : Komp. PAP II Blok B XXI/6 RT 006 RW 007
Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang - Banten
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Nomor Telepon : 08569091757 / 08998685255
Email : hijriatulmabruk@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Kartini (1997-2003)
2. SMP Negeri 2 Tangerang (2003-2006)
3. SMA Negeri 2 Tangerang (2006-2009)
4. S1 Administrasi Negara FISIP UNTIRTA (2009-2016)

RIWAYAT ORGANISASI

1. PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat PERSIP UNTIRTA (2012-2014)
2. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNTIRTA (2011-2012)
3. Klaster 3 Administrator Muda Indonesia (ADMI) (2010-2011)
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa FISIP UNTIRTA (2010-2011)
5. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UNTIRTA (2010-2011)
6. KOMINFO Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UNTIRTA (2009-2010)
7. Wakil Ketua Paskibra SMA Negeri 2 Tangerang (2007-2008)
8. Kord. Komisi B Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 2 Tangerang (2007-2008)
9. Komisi 3 Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 2 Tangerang (2006-2007)

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Sales Underwriter Marketing di PT Astra Credit Companies (ACC) (2013-2016)

Serang, 22 Agustus 2016

Hijriatul Mabruk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

04 Maret 2014

Kepada Yth.
Dinas Sosial Kota Tangerang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Hijriatul Mabruk
NIM : 6661091655
Semester : X
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Data : - Undang-undang tentang judul terkait diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011